

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Periode Penerapan : 2023

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Program Pembentukan Regulasi	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	Tidak semua K/L memanfaatkan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang disampaikan Belum optimalnya komitmen K/L untuk memanfaatkan DPHN sebagai landasan dalam mengatasi permasalahan hukum saat ini
			Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	Belum sempurnanya tata kelola administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Hukum
	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan di bawah persentase target capaian
				Capaian Progsun PP/Perpres dan Prolegda tidak sesuai dengan perencanaan
				Tidak semua rancangan UU/PP/Perpres yang masuk ke dalam program perencanaan (Prolegnas di lingkungan Pemerintah/Progsun) telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Jumlah Naskah Akademik yang ditindak lanjuti dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang	Naskah akademik yang dihasilkan belum secara komprehensif menjawab kebutuhan penyusunan penormaam
				Naskah akademik belum ditindaklanjuti dengan penyusunan RUU
			Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	Jumlah permohonan naskah akademik tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
				Batas waktu penyelesaian penelarasan NA RUU tidak sesuai dengan SOP
				Permohonan Penyelarasan NA melalui aplikasi Sirenkum (berbasis TI) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna layanan (K/L)
				RUU mengalami perubahan materi setelah penelarasan NA
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	terpenuhinya Kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif Indeks Kepuasan layanan perpustakaan	Belum semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpartisipasi aktif Adanya kemungkinan tidak objektifnya penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN dalam rangka Penghargaan JDIH Hasil survey tidak memenuhi standar/batas capaian yang telah ditetapkan
			Persentase website Anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Belum semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi
	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Akses Keadilan Masyarakat	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah Persentase JF Penyuluh Hukum yang memenuhi standar Kompetensi	Banyaknya Program pada K/L yang sarasannya Desa/kelurahan Belum memiliki peta penyuluhan hukum sebagai bahan dasar penyusunan materi penyuluhan hukum baik ditingkat pusat dan daerah Penyuluh Hukum belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi
				Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum perlu mendapatkan sertifikasi

		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penerima bantuan hukum litigasi bukan orang miskin
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi kurang maksimal dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
		Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	Pelaksanaan pengawasan dalam rangka menilai kepuasan layanan bantuan hukum belum dilaksanakan secara maksimal
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPHN	Terwujudnya layanan dukungan manajemen BPHN	Jumlah layanan internal
			Hilang/ rusak nya dokumen pegawai
			Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan
			adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan
			kurang optimal dalam pengembangan kompetensi pegawai
			Keterlambatan waktu pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun
			Belum adanya aplikasi evaluasi kinerja pegawai
			Penyetaraan jabatan bagi beberapa pejabat tidak sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang diduduki sebelumnya
			Usulan kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan yang diterima
			Proses mutasi kurang memerhatikan kebutuhan organisasi
			Penilaian terhadap usulan mutasi dan promosi tidak dilakukan secara objektif
			Dalam proses mutasi, promosi, dan pengurusan berkas kepegawaian
			Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran belum optimal
			Pembuatan draft naskah dinas yang tidak sesuai dengan permenkumham No. 31 Th 2020
			Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang tahan air dan api
			belum maksimalnya penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.
			belum maksimalnya penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.
		Jumlah layanan dukungan manajemen BPHN	Kendala pengumpulan bahan informasi dari pelaksana kegiatan untuk dipublikasikan
			Penyelenggaraan kerjasama di pusat-pusat belum mengikuti aturan Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kerjasama dan Surat Edaran Sekjen SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
			Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum maksimal
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) belum maksimal
			Inkonsistensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan RPD/DIPA
			Adanya pagu detail hingga 16 segmen akun kegiatan pada aplikasi SAKTI
			Aplikasi SAKTI modul anggaran dari Kemenkeu sering terjadi <i>maintenance</i>
			Dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
			Terlambatnya pengumpulan dokumen pertanggungjawaban jika LS.
			Aplikasi SAKTI (modul pembayaran) error dan maintenance
			Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap
			Aplikasi penyusunan laporan keuangan belum sempurna

			Integrasi Aplikasi SAKTI dan SIMAN yang belum sempurna
			Proses penghapusan BMN yang sangat lama/panjang
			Perubahan pengelolaan BMN yang semula menggunakan aplikasi SIMAK BMN menjadi aplikasi SAKTI
			Website www.bphn.go.id Down
			Pengelolaan Teknologi Informasi Tidak Maksimal
		Jumlah Layanan Perkantoran	Keterlambatan penerimaan SK KGB/KP/Fungsional dalam pengajuan Gaji
			Kurangnya data dukung dalam pengajuan usulan uang Lembur pegawai
			Kapasitas Generator Set tidak mencukupi seluruh kebutuhan listrik kantor



Jakarta, Februari 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2023

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Tidak semua K/L memanfaatkan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang disampaikan	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan rendah	Kepala BPHN	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan oleh K/L lebih kecil dibandingkan dengan jumlah output rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	Eksternal	UC	Kebijakan Deregulasi dan Reregulasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya	Pemerintah	Penerbitan SOP Tindakanlanjut Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum (PHN-OT.02.02-73)	Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan rendah	Risiko Kebijakan
2	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya komitmen K/L untuk memanfaatkan DPHN sebagai landasan dalam mengatasi permasalahan hukum saat ini	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada	Kepala BPHN	Perbedaan kepentingan atau cara pandang antar Kementerian/Lembaga (ego sektoral)	Eksternal	UC	Tidak terwujudnya sinergitas dalam menyelesaikan permasalahan hukum saat ini	Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian	Mensinergikan penyusunan DPHN dengan melibatkan seluruh Unit Eselon 2 yang ada di BPHN	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada	Risiko Kebijakan
3	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	Belum sempurnanya tata kelola administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Hukum	Adanya ketidakpastian terkait dengan mekanisme pengembangan dan pembinaan JF Analis Hukum	Kepala BPHN	Perubahan sistem penilaian kinerja JF	Eksternal	UC	Instansi Pembina kehilangan kontrol penilaian kinerja Pejabat Fungsional Analis Hukum	Individu/Pegawai/Kementerian	Koordinasi dengan Kementerian PAN RB dan BKN	Instansi Pembina belum dapat melakukan penyesuaian peraturan terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum dan petunjuk teknisnya	Risiko Kebijakan
4			Belum meratanya data dan informasi perkembangan maupun perubahan kebijakan pembinaan JF Analis Hukum	Kepala BPHN	Tidak adanya sebuah sistem informasi yang dapat menjadi wadah informasi berkaitan dengan jabatan fungsional	Internal	C	Instansi Pengguna dan Analis Hukum tidak mengetahui data dan informasi terkait dengan perkembangan maupun perubahan kebijakan pembinaan JF Analis Hukum	Individu/Pegawai	Sosialisasi dan Koordinasi dengan seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum, baik melalui rapat maupun penerbitan surat edaran	Data dan informasi perkembangan maupun perubahan kebijakan pembinaan Analis Hukum belum komprehensif	
5	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan di bawah persentase target capaian	Capaian Prolegnas belum sesuai dengan target yang direncanakan	Kepala BPHN	Capaian dalam Prolegnas tidak sesuai target yang direncanakan karena pemrakarsa belum siap substansi RUU nya	Eksternal	UC	Capaian RUU Pemrakarsa pemerintah yang masuk dalam Prolegnas Prioritas belum sesuai dengan target yang direncanakan	Pemerintah dan DPR	Mengadakan koordinasi dengan K/L pemrakarsa	Ada beberapa RUU yang belum diselesaikan tepat waktu	Risiko Kebijakan
6				Kepala BPHN	Kewenangan untuk menentukan daftar RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dikoordinasikan oleh DPR sehingga tidak seluruh usulan pemerintah dapat disetujui DPR	Eksternal	UC	Tidak semua RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas		Mengadakan koordinasi dengan DPR dan K/L pemrakarsa		
7	0	Capaian Progsun PP/Perpres dan Prolegda tidak sesuai dengan perencanaan	Capaian Progsun PP/Perpres belum sesuai dengan target yang direncanakan	Kepala BPHN	Dalam proses penyusunan RPP atau RPerpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar K/L terkait	Eksternal	UC	1. Undang-Undang yang membutuhkan peraturan pelaksana tidak efektif berjalan karena PP/Perpres tidak segera disahkan 2. Penganggaran penyusunan RPP, RPerpres tidak efisien	Pemerintah	Mengadakan koordinasi dengan Kanwil dan Pemda	Ada beberapa PP atau Perpres yang belum diselesaikan tepat waktu	Risiko Kebijakan

8	0	Tidak semua rancangan UU/PP/Perpres yang masuk ke dalam program perencanaan (Prolegnas di lingkungan Pemerintah/Progsun) telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk menetapkan rancangan UU/PP/Perpres yang masuk ke dalam program perencanaan (Prolegnas di lingkungan Pemerintah/Progsun)	Kepala BPHN	Belum ada pedoman pengendalian pengusulan RUU Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan pengusulan RPP/RPerpres	Internal	C	Tidak semua usulan RUU/RPP/RPerpres yang masuk dalam program perencanaan (Prolegnas/Progsun) telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kementerian	Membuat kebijakan pengendalian pengusulan RUU/RPP/RPerpres dalam program perencanaan	Terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk menetapkan rancangan UU/PP/Perpres yang masuk ke dalam program perencanaan (Prolegnas di lingkungan Pemerintah/Progsun)	Risiko Kebijakan
9			Fasilitasi Prolegda yang dilakukan belum efektif meningkatkan capaian Prolegda	Kepala BPHN	Fasilitasi Prolegda yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif karena pelibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah	Internal	C	Tingkat realisasi capaian Prolegda belum sesuai dengan perencanaan	BPHN dan Pemerintah Daerah	Adanya pedoman SOP yang dibuat	Masih terdapat daerah yang belum dapat dilakukan fasilitasi Prolegda oleh Kemenkumham	Risiko Operasional
10	Jumlah Naskah Akademik yang ditindak lanjuti dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang	Naskah akademik yang dihasilkan belum secara komprehensif menjawab kebutuhan penyusunan penormaan	tidak tersedianya NA sebagai dasar penyusunan RUU	Kepala BPHN	data hasil penelitian/pengkajian terbatas	Eksternal	C	Terhambatnya penyusunan undang-undang	Kementerian	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	penambahan jangka waktu penyusunan naskah akademik	
11				Kepala BPHN	adanya permasalahan yang sebelumnya tidak ada dalam kajian dan membutuhkan penguatan atas solusi permasalahan yang ada	Eksternal	C	target penyelesaian penyusunan naskah akademik tidak tercapai	Kementerian	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait		
12	0	Naskah akademik belum ditindaklanjuti dengan penyusunan RUU	rencana pembentukan undang-undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak selesai sesuai dengan target dalam Prolegnas	Kepala BPHN	Kewenangan penentuan RUU yang akan disusun ada pada unit eselon I lain di Kementerian Hukum dan HAM	Eksternal	UC	target penyusunan rancangan undang-undang prakarsa kementerian hukum dan HAM tidak tercapai sesuai target Prolegnas	Kementerian	melakukan koordinasi dengan unit eselon I yang memiliki kewenangan penyusunan RUU	rencana pembentukan undang-undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak selesai sesuai dengan target dalam Prolegnas	
13				Kepala BPHN	Perubahan fokus penyusunan RUU pada unit teknis yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan substansi pengaturan	Eksternal	C	target penyusunan rancangan undang-undang prakarsa kementerian hukum dan HAM tidak tercapai sesuai target Prolegnas	Kementerian	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait		
14	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	Jumlah permohonan naskah akademik tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	naskah akademik yang dimohonkan penyelarasan tidak mencapai target yang ditetapkan	Kepala BPHN	Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa	eksternal	UC	Target kinerja tidak tercapai	Kementerian	Melakukan pemetaan terhadap RUU Prakarsa Pemerintah yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan Memperkirakan jumlah RUU DKT	naskah akademik yang dimohonkan penyelarasan tidak mencapai target yang ditetapkan	
15	0	Batas waktu penyelesaian penyelarasan NA RUU tidak sesuai dengan SOP	Pelaksanaan kegiatan penyelarasan tidak tercapai sesuai target waktu	Kepala BPHN	Pemrakarsa lama dalam menetapkan kebijakan yang akan dituangkan dalam NA dan kurang memiliki komitmen dalam menindaklanjuti masukan	eksternal	UC	Terhambatnya penyusunan undang-undang	Kementerian	Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terkait perkembangan perbaikan NA yang sudah dilakukan perbaikan oleh Pemrakarsa atas masukan dari BPHN	Pelaksanaan kegiatan penyelarasan tidak tercapai sesuai target waktu	

16	0	Permohonan Penyelarasana NA melalui aplikasi Sirenkum (berbasis TI) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna layanan (K/L)	SPBE penyelarasana NA tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepala BPHN	Pemrakarsa tidak memiliki komitmen untuk memanfaatkan aplikasi Sirenkum	Eksternal	C	Kegiatan penyelarasana NA menjadi terhambat	Menteri Hukum dan HAM dan Pemrakarsa	Melakukan sosialisasi kepada K/L terkait penggunaan Aplikasi Sirenkum	SPBE terkait penyelarasana NA tidak berjalan sebagaimana mestinya	
17			Proses disposisi dari Menkumham atas permohonan penyelarasana NA dari Pemrakarsa ke BPHN menjadi lebih lama	Kepala BPHN	Surat permohonan penyelarasana dan harmonisasi disampaikan dalam satu surat secara manual sehingga disposisi Menkumham hanya di tujukan kepada DitjenPP	Eksternal	C	Proses permohonan penyelarasana menjadi tidak efektif dan efisien	Menteri Hukum dan HAM dan Pemrakarsa	SDA	Proses memberikan disposisi permohonan penyelarasana NA dari Pemrakarsa ke BPHN menjadi lebih lama	
18		RUU mengalami perubahan materi setelah penyelarasana NA	Surat keterangan hasil Penyelarasana dan dokumen pendukungnya menjadi tidak relevan dengan perkembangan materi muatan RUU	Kepala BPHN	Perubahan kebijakan pemerintah	Eksternal		Naskah akademik yang diselarasana belum secara komprehensif menjawab kebutuhan penyusunan penorma	Kementerian	melakukan pemantauan dan pendampingan penyempurnaan atau perbaikan NA	Melakukan perbaikan isi NA disesuaikan dengan RUU yang sudah berubah	
19	Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Belum semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpartisipasi aktif	Belum adanya pengelolaan JDIH pada instansi Anggota JDIHN	Kepala BPHN	Belum semua Anggota JDIHN memahami Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Eksternal	C	Database dokumen hukum nasional pada Pusat JDIHN menjadi tidak lengkap	Pusat JDIHN, Anggota JDIHN dan masyarakat	Sosialisasi PERPRES Nomor 33 Tahun 2012	Database dokumen hukum nasional yang lengkap belum dapat terwujud	Resiko Kebijakan
20			Belum terukurnya jumlah Anggota JDIHN	Kepala BPHN	Adanya beberapa instansi Anggota JDIHN yang terbentuk karena kebutuhan kebijakan	Eksternal	UC	Jumlah Anggota JDIHN tidak dapat terukur secara pasti	Pusat JDIHN	Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait	Kepastian jumlah Anggota JDIHN yang terukur	Resiko Kebijakan
21	0	Adanya kemungkinan tidak objektifnya penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN dalam rangka Penghargaan JDIH	Anggota JDIHN mengeluhkan hasil penilaian	Kepala BPHN	Adanya kolusi dalam penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	Internal	C	Tidak adanya kepercayaan terhadap hasil penilaian Pengelolaan Anggota JDIH	Anggota JDIHN	Penilaian hasil Penilaian Pengelolaan Anggota JDIH disampaikan dalam bentuk SK Menteri kepada Anggota JDIHN secara transparan	masih adanya keluhan dalam mekanisme penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	Resiko Kebijakan
22	Indeks Kepuasan layanan perpustakaan	Hasil survey tidak memenuhi standar/batas capaian yang telah ditetapkan	Masyarakat mengeluhkan kurangnya layanan dokumen hukum	Kepala BPHN	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum	Internal	C	Indeks Kepuasan Masyarakat kurang	Perpustakaan dan Pemustaka	Janji Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan	Belum seluruhnya koleksi dokumen dan informasi hukum dapat dilayanan dengan baik	Resiko Kebijakan, Resiko Operasional
23			Kualitas publikasi BPHN yang dilayanan belum memuaskan masyarakat	Kepala BPHN	Quality Control atas substansi publikasi BPHN belum maksimal	Internal	UC	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap publikasi BPHN	Masyarakat	Surat Pemberitahuan BPHN atas terbitan yang bersangkutan	masih adanya kemungkinan keluhan masyarakat terhadap publikasi BPHN lainnya	Resiko Kebijakan, Resiko Operasional
24			Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang dikelola belum dilaksanakan sesuai dengan Standar	Kepala BPHN	Kurangnya kapasitas sumber daya (baik kualitas ataupun kuantitas) yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum	Internal		Tidak maksimalnya capaian nilai akreditasi perpustakaan	Instansi khususnya Bidang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perpustakaan	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselenggarakan	menurunnya nilai status saat rekrreditasi ulang perpustakaan	Resiko Kebijakan, Resiko Operasional
25			Sarana Prasarana untuk mendukung pengolahan dan pelayanan belum cukup memadai	Kepala BPHN	Kurangnya dukungan Sarana Prasarana dalam pengolahan dan pelayanan perpustakaan	Internal	C	pengolahan dan pelayanan dokumen dan informasi hukum belum maksimal	Masyarakat	Pengajuan penambahan dukungan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan belum sesuai standar	Resiko Kebijakan
26	Persentase website Anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Belum semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi	Belum adanya website JDIH pada instansi Anggota JDIHN	Kepala BPHN	Belum semua anggota JDIHN memiliki website JDIH	Eksternal	C	Database Dokumen Hukum Nasional Portal JDIHN belum lengkap	Pusat JDIHN, Anggota JDIHN, dan Masyarakat	- Sosialisasi Perpres 33/2012 dan Permenkumham 8/2019 - Promosi Program Percepatan Integrasi (PROPESI)	Database Dokumen Hukum Nasional yang lengkap belum dapat terwujud	Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional

27			Belum Pahami nya Anggota JDIHN terkait Standar Pengelolaan JDIH	Kepala BPHN	Pengelola JDIH anggota JDIHN belum memahami Standar Permenkumham 8/2019	Eksternal	C	Pengelolaan JDIH Anggota JDIHN belum sesuai dengan Standar Permenkumham 8/2019	Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN	Workshop Pemahaman Standar Pengelolaan JDIH dan Validasi Dokumen Hukum JDIHN	Pengelolaan Website JDIH Anggota JDIHN belum sesuai dengan Standar Permenkumham 8/2019	Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional
28	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah	Banyaknya Program pada K/L yang sasarannya Desa/kelurahan	Lambatnya Jumlah Desa/Kel Sadar Hukum yang diresmikan	Kepala BPHN	Banyaknya program pembentukan Desa/Kel yang dilaksanakan pada K/L sehingga pembentukan Desa/Kel Sadar Hukum ditingkat pemerintah pusat dan daerah sangat sulit hal ini karena masing-masing K/L menjalankan program Desa/Kel yang tidak dikordinir oleh salah satu K/L	Internal/ Eksternal	C	Lambatnya jumlah Desa/Kel yang diresmikan pada setiap tahun berjalan	Kementerian, BPHN dan Kanwil Kemenkumham	Presiden mengeluarkan aturan terkait salah satu K/L yang mempunyai tusi sebagai koordinator Program Desa/Kel sehingga seluruh K/L sehingga jika K/L mempunyai Program Desa/Kel wajib berkoordinasi dengan K/L yang menjadi koordinator Program Desa/Kel tersebut	Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa/Kel sehingga akan menghasilkan kesejahteraan dan berhasilnya membangun kepercayaan Negara Asing untuk membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia	Risiko Kebijakan
29	0	Belum memiliki peta penyuluhan hukum sebagai bahan dasar penyusunan materi penyuluhan hukum baik ditingkat pusat dan daerah	Penyuluhan hukum yang dilaksanakan kurang tepat sasaran karena tidak ada tema penyuluhan hukum secara nasional yang wajib dilaksanakan seretak dalam periode satu tahun berjalan	Kepala BPHN	Belum disusunnya materi/tema penyuluhan hukum nasional yang akan digunakan sebagai materi/tema yang wajib dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum baik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi Pengguna JF Penyuluh Hukum	Internal/ Eksternal	C	Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran	Kementerian, BPHN dan Kanwil Kemenkumham	Penyusunan Materi/Tema Penyuluhan Hukum Nasional dan Materi / Tema Penyuluhan Hukum bagi masing-masing K/L serta dilingkungan Kemenkumham	Menyusun Peta Penyuluhan Hukum sebagai bahan dalam menyusun materi/tema penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tepat sasaran	Risiko Kebijakan
30	Persentase JF Penyuluh Hukum yang memenuhi standar Kompetensi	Penyuluh Hukum belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi	Persentase Penyuluh Hukum yang memenuhi standar kompetensi rendah	Kepala BPHN	belum adanya pemetaan kompetensi JF Penyuluh Hukum	Internal/Ekst ernal	C	Pemenuhan standar kompetensi JF Penyuluh Hukum kurang tepat sasaran	Kementerian dan Instansi Pengguna	menyusun pemetaan kompetensi Penyuluh Hukum	Persentase Penyuluh Hukum yang memenuhi standar kompetensi rendah	Risiko Kebijakan
31	0	Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum perlu mendapatkan sertifikasi	Jumlah Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang belum tersertifikasi	Kepala BPHN	belum adanya Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang tersertifikasi	Internal	C	Pelaksanaan Uji Kompetensi yang belum Optimal	Kementerian dan Instansi Pengguna	melakukan penguatan tim Uji Kompetensi melalui identifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi	Jumlah Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang belum tersertifikasi	Risiko Kebijakan
32	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penerima bantuan hukum litigasi bukan orang miskin	Pelaksanaan verifikasi permohonan bantuan hukum dapat terindikasi terjadinya gratifikasi maupun pungutan oleh verifikasi daerah	Kepala BPHN	Kurangnya integritas dari Tim Verifikator daerah dalam pelaksanaan berkas permohonan bantuan hukum	Internal	C	Pemberian layanan Bantuan Hukum Litigasi tidak tepat sasaran	Kementerian dan Masyarakat	Penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum dan melakukan pembinaan ke verifikasi daerah	Pelaksanaan verifikasi permohonan bantuan hukum dapat terindikasi terjadinya gratifikasi maupun pungutan oleh verifikasi daerah	Risiko Kebijakan
33	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi kurang maksimal dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH)	Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang dilakukan oleh PBH kurang maksimal dibandingkan dengan Litigasi bahkan ada beberapa PBH tidak sama sekali melaksanakan kegiatan non litigasi	Kepala BPHN	Kurangnya pemahaman PBH terkait pentingnya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan lebih mengutamakan bantuan hukum litigasi	Eksternal	C	Layanan bantuan hukum nonlitigasi tidak terlaksana secara maksimal oleh Pemberi Bantuan Hukum	Kementerian dan Masyarakat	Melakukan pembinaan kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan melaksanakan pengalihan anggaran terhadap pemberi Bantuan Hukum yang tidak aktif dalam kegiatan non litigasi	Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi tidak merata	Risiko Kebijakan
34	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	Pelaksanaan pengawasan dalam rangka menilai kepuasan layanan bantuan hukum belum dilaksanakan secara maksimal	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh PBH	Kepala BPHN	Pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima bantuan hukum	Internal	C	Hasil pengawasan belum efektif mendukung tindak lanjut perbaikan pelaksanaan bantuan hukum	Kementerian dan Masyarakat	Melakukan sosialisasi pengembangan kapasitas petugas verifikasi serta menyediakan sarana layanan informasi terkait penyelenggaraan bantuan hukum	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh PBH	Risiko Kebijakan
35	Jumlah layanan internal	Hilang/ rusak nya dokumen pegawai	Kehilangan data pegawai	Kepala BPHN	Kelalaian pegawai saat mengarsipkan atau menyimpan dokumen	Internal	C	Pegawai tidak dapat naik pangkat, pensiun, mutasi, dll	Seluruh pegawai (BPHN)	SIMPEG dan melakukan scanning data	Kehilangan data pegawai	
36	0		Kehilangan data pegawai	Kepala BPHN	bencana alam seperti kebakaran dan banjir	eksternal	UC	Pegawai tidak dapat naik pangkat, pensiun, mutasi, dll	BPHN dan Kementerian	SIMPEG dan melakukan scanning data	Kehilangan data pegawai	

37	0	Keterlambatan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk tunjangan kinerja dan uang makan	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Kepala BPHN	Load server simpeg tinggi	eksternal	UC	Keterlambatan laporan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan	Seluruh pegawai (BPHN)	Mengusulkan penambahan bandwidth internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	
38	0		Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Kepala BPHN	Pegawai terlambat menginput izin, DL, Cuti ke dalam SIMPEG	eksternal	UC	Keterlambatan laporan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan serta pemotongan tunjangan pegawai yang bersangkutan	Seluruh pegawai (BPHN)	Membuat pemberitahuan notifikasi setiap bulan pada media sosial whatsapp BPHN	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	
39	0	adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang tidak tersosialisasikan	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Kepala BPHN	kurang responsif	Internal	C	Pembinaan kepegawaian yang tidak sesuai aturan	BPHN	Mengadakan kegiatan sosialisasi aturan hukum tentang kepegawaian	Peraturan baru kurang disosialisasikan	
40	0		Peraturan baru kurang disosialisasikan	Kepala BPHN	kurang koordinasi antar instansi	eksternal	UC	Pembinaan kepegawaian yang tidak sesuai aturan	BPHN	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait	Peraturan baru kurang disosialisasikan	
41	0	kurang optimal dalam pengembangan kompetensi pegawai	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	Kepala BPHN	Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan	Eksternal	UC	Pegawai kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya	BPHN dan Kementerian	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan kebutuhan pelatihan	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	
42	0	Keterlambatan waktu pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun	Pembayaran dan hak pegawai terlambat	Kepala BPHN	Biro kepegawaian lama dalam menerbitkan SK	Eksternal	UC	Keterlambatan Kenaikan Pangkat dan pembayaran Pensiun pegawai	Pegawai yang bersangkutan (BPHN)	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	Pembayaran dan hak pegawai terlambat	
43	0	Belum adanya aplikasi evaluasi kinerja pegawai	Penilaian masih dilakukan secara manual	Kepala BPHN	Aplikasi Simpeg belum mengakomodir evaluasi kinerja sesuai Permenpan 6 Tahun 2022	Eksternal	UC	Dapat mengakibatkan evaluasi kinerja yang dilaksanakan kurang sesuai dengan peraturan	Seluruh pegawai (BPHN)	Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap dokumen evaluasi kinerja pegawai	masih ada kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan terdapat kesalahan	
44	0	Penyetaraan jabatan bagi beberapa pejabat tidak sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang diduduki sebelumnya	Adanya ketidaksesuaian antara jabatan baru dengan jabatan lama	Kepala BPHN	belum optimalnya hasil penyetaraan jabatan	Eksternal	UC	Kebingungan dalam menjalankan tugas dan fungsi	BPHN	Melakukan sosialisasi terkait penyetaraan jabatan	masih banyak pejabat yang bingung terhadap penyetaraan jabatan	
45	0	Usulan kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan yang diterima	kebutuhan pegawai kurang sehingga beban kerja melebihi kapasitas	Kepala BPHN	rekrutmen yang diadakan tidak sesuai dengan usulan jumlah kebutuhan	Eksternal	UC	Beban kerja pegawai melebihi kapasitasnya	BPHN	Menempatkan pegawai baru sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi	masih adanya kekurangan pegawai	
46	0	Proses mutasi kurang memerhatikan kebutuhan organisasi	Adanya ketidakseimbangan jumlah pegawai untuk mengisi jabatan satu dengan lainnya	Kepala BPHN	kurangnya memperhatikan kebutuhan organisasi saat mutasi	Internal	C	Kurang optima dalam pencapaian tujuan organisasi	BPHN	Melakukan koordinasi dalam proses mutasi	masih perlu meningkatkan koordinasi	
47	0	Penilaian terhadap usulan mutasi dan promosi tidak dilakukan secara objektif	Adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi dan promosi	Kepala BPHN	Proses pengusulan mutasi dan promosi tidak transparan	Internal	C	Merugikan pegawai yang dalam proses mutasi dan promosi	BPHN	dilakukan monitoring secara berkala oleh pimpinan	Masih adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi dan promosi	
48	0	Dalam proses mutasi, promosi, dan pengurusan berkas kepegawaian	Adanya kemungkinan terjadi pungli saat proses mutasi dan promosi serta pengurusan berkas kepegawaian	Kepala BPHN	Adanya kebutuhan pegawai agar proses pengurusan berkas kepegawaian dipercepat	Internal	UC	Ketidakpercayaan pegawai terhadap kredibilitas bagian kepegawaian	BPHN	Melakukan sosialisasi terkait tata nilai pasti, kode etik dan kode perilaku	masih terdapat pegawai yang tidak menerapkan tata nilai, kode etik dan kode perilaku	

49		Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran belum optimal	Satuan kerja (Unit Teknis, Bagian dan Kantor Wilayah) dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Kepala BPHN	Satuan kerja belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran	Eksternal	C	Hasil bahan penyusunan rencana, program dan anggaran ada yang belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	BPHN	Melakukan penelaahan atas usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran dari satuan kerja	Masih terdapat usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Risiko Kepatuhan
50		Pembuatan draft naskah dinas yang tidak sesuai dengan permenkumham No. 31 Th 2020	Masih adanya Draft naskah dinas yang tidak sesuai dengan permenkumham No.31 Tahun 2020	Kepala BPHN	Kurangnya pemahaman mengenai tata naskah dinas	internal	C	Menghambat proses persuratan karena koreksi yang berulang	BPHN DAN INSTANSI TERKAIT	Sosialisasi terkait tata naskah dinas	Masih adanya Draft naskah dinas yang tidak sesuai dengan permenkumham No.31 Tahun 2020	
51		Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang tahan air dan api	Arsip rentan rusak dan hilang	Kepala BPHN	- Terjadinya kehilangan arsip yang belum masuk daftar arsip - Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan arsip dalam ruang arsip - Kurangnya pengetahuan tentang jenis arsip	Internal	C	- Tempat Penyimpanan Arsip belum tertata - Belum tersedianya lemari arsip yang tahan api dan air	BPHN	Melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai dengan tata kelola arsip dinamis.	Arsip rentan rusak dan hilang	
52		belum maksimalnya penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	Kepala BPHN	pemahaman kearsipan yang masih kurang	internal	C	tidak dapat melakukan pengelompokan serta pemusnahan arsip dengan baik	BPHN dan Kementerian	SOP	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	Risiko Oprasional
53		belum maksimalnya penggunaan sisumaker yang efektif dan efisien.	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	Kepala BPHN	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	internal	C	Sisumaker yang terbengkalai	BPHN dan Kementerian	SOP	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	Risiko Oprasional
54		Kendala pengumpulan bahan informasi dari pelaksana kegiatan untuk dipublikasikan	Berita yang dipublikasikan sudah tidak real time	Kepala BPHN	Kurang aktifnya kontributor humas di masing-masing pusat	Eksternal	C	Sulit meningkatkan followers media sosial BPHN dan viewers cenderung menurun	BPHN	Humas proaktif melakukan konfirmasi kepada masing-masing kontributor disetiap pusat	Kontributor di masing-masing pusat terkendala birokrasi terkait persetujuan dari atasan dalam memberikan bahan informasi kegiatan	
55		Penyelenggaraan kerjasama di pusat-pusat belum mengikuti aturan Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kerjasama dan Surat Edran Sekjen SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Penyelenggaraan kerjasama tidak sesuai dengan aturan kerjasama	Kepala BPHN	Kurang taatnya pusat-pusat dalam mematuhi aturan terkait penyelenggaraan kerjasama	Eksternal	C	Data terkait kerjasama tidak lengkap sehingga Laporan Monitoring dan evaluasi yang di minta Biro Humas, Kerja Sama dan KLN tidak dapat di penuhi	Kementerian	Melaporkan permasalahan kerjasama kepada Sekretaris BPHN	Masih ada rencana kerjasama yang tidak melalui Kelompok Substansi kerjasama	
56		Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum maksimal	Nilai SAKIP BPHN turun	Kepala BPHN	rekomendasi hasil reviu APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti	Internal	C	Nilai SAKIP BPHN tidak mengalami peningkatan secara signifikan sehingga berpengaruh terhadap rata-rata nilai SAKIP Kementerian	Kementerian	Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu APIP	Nilai SAKIP BPHN tidak mengalami peningkatan	Risiko Operasional
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) belum maksimal	Nilai RB BPHN turun	Kepala BPHN	Persentase data dukung RB yang dinyatakan sesuai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah data dukung RB yang dipenuhi	Internal	C	Nilai RB BPHN tidak mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap rata-rata nilai RB Kementerian	Kementerian	Menyusun rencana aksi untuk pemenuhan data dukung RB	Nilai RB BPHN tidak mengalami peningkatan	Risiko Operasional

57	0	Inkonsistensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan RPD/DIPA	Banyaknya proses usulan revisi anggaran	Kepala BPHN	Ketidaksiharian antara pelaksanaan kegiatan dengan kalender kerja yang telah disusun	Internal	C	Penurunan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kementerian	Rapat koordinasi dengan pelaksana kegiatan terkait update penyusunan RPD secara triwulan	Penyusunan RPD disusun secara tidak cermat dan teliti	Risiko Kebijakan
58	0	Adanya pagu detail hingga 16 segmen akun kegiatan pada aplikasi SAKTI	Terjadinya pagu minus belanja saat proses validasi belanja pada aplikasi SAKTI	Kepala BPHN	Pelaksana kegiatan belum menggunakan data RKAKL revisi terakhir saat penginputan di matrik semula menjadi	Internal	C	Proses usulan revisi anggaran terhambat	Kementerian	Penyebarluasan RKAKL hasil revisi ke pemangku kegiatan serta data realisasi anggaran per kegiatan secara update	Ketidaksiharian data realisasi anggaran di pelaksana kegiatan dengan di pengelola keuangan	Risiko Operasional
59	0	Aplikasi SAKTI modul anggaran dari Kemenkeu sering terjadi maintenance	Tidak bisa dilakukan penginputan usulan revisi anggaran	Kepala BPHN	Beban server aplikasi SAKTI di kemenkeu menjadi tinggi karena banyak diakses oleh seluruh satker di K/L	Eksternal	UC	Pelaksanaan anggaran terhambat	Kementerian	Proses penginputan dan pengajuan usulan revisi anggaran dilakukan H-5 sebelum batas akhir revisi serta koordinasi dengan Direktorat SITP dan Kanwil DJPb DKI Jakarta Kemenkeu	Dokumen usulan revisi dari pemangku kepentingan terjadi secara mendadak	Risiko Kebijakan
60	#REF!	Dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku.	Terjadinya perbedaan capaian kinerja dan realisasi anggaran.	Kepala BPHN	Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan terkait tata cara pembayaran.	Internal	UC	Keterlambatan pencairan dana dan realisasi anggaran.	BPHN	Sosialisasi terkait tata cara pembayaran.	Dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan aturan berlaku.	
61	0	Terlambatnya pengumpulan dokumen pertanggungjawaban jika LS.	Terhambatnya efisiensi waktu dalam pengarsipan dokumen pertanggungjawaban	Kepala BPHN	Kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan dalam ketepatan waktu mempertanggungjawabkan dokumen keuangan.	Internal		Proses pengarsipan pertanggungjawaban terhambat sehingga terjadi penumpukan dokumen.	BPHN	Punishment untuk pelaksanaan kegiatan yang terlambat.	Kurang efisiensi dan akuntabel dalam pengarsipan dokumen keuangan.	
62		Aplikasi SAKTI (modul pembayaran) error dan maintenance	Terhambatnya proses pembayaran dalam pengajuan LS, UP, TUP, Pemotongan pajak dan pengajuan revolving	Kepala BPHN	Aplikasi down dan error dari server kemenkeu.	Eksternal		Keterlambatan pencairan dana dan realisasi anggaran.	BPHN	Menghubungi hai CSO dan konsultasi langsung ke KPPN Jakarta V.	Terhambatnya pencairan anggaran kegiatan.	
63	0	Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap	Temuan oleh pemeriksa laporan keuangan	Kepala BPHN	Data dukung penyusunan laporan keuangan tidak diserahkan tepat waktu	Internal / Eksternal	C	Mempengaruhi penilaian atas Laporan Keuangan	BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM	Koordinasi intensif dengan pelaksana kegiatan	Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap	Risiko Teknis
64	0	Aplikasi penyusunan laporan keuangan belum sempurna	Terhambatnya penyusunan laporan keuangan	Kepala BPHN	Pergantian aplikasi penyusunan laporan keuangan	Eksternal	UC	Mempengaruhi Keandalan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan	BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM	Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan	Aplikasi penyusunan laporan keuangan belum sempurna	Risiko Teknis dan Risiko Kebijakan
65		Integrasi Aplikasi SAKTI dan SIMAN yang belum sempurna	Terhambatnya penyusunan Wasdal dan RKBMN	Kepala BPHN	update data SIMAN yang lama dari aplikasi SAKTI	Eksternal	UC	Laporan wasdal tidak tepat waktu yang mengakibatkan Penundaan pelaksanaan RKBMN	BPHN dan Kementerian	Koordinasi dengan instansi terkait (DJKN dan Biro Pengelolaan BMN)	Terhambatnya penyusunan Wasdal dan RKBMN	
66		Proses penghapusan BMN yang sangat lama/panjang	Penumpukan barang rusak berat	Kepala BPHN	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan/KPKNL	eksternal	UC	Penghapusan BMN terlambat	BPHN dan Kementerian	Koordinasi dengan instansi terkait (KPKNL dan Biro Pengelolaan BMN)	Penumpukan barang rusak berat	
67		Perubahan pengelolaan BMN yang semula menggunakan aplikasi SIMAK BMN menjadi aplikasi SAKTI	Aplikasi SAKTI yang belum sempurna	Kepala BPHN	Masih sering terjadi error dan proses pembaharuan aplikasi yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan	eksternal	UC	Pergeseran data yang mengakibatkan timbulnya Laporan 13 dan 14 (an audited dan audited)	Kementerian	Koordinasi dengan instansi terkait (DJKN dan Biro Pengelolaan BMN)	Aplikasi SAKTI yang belum sempurna	

68		Website www.bphn.go.id Down	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	Kepala BPHN	Provider	External	UC	1. Pegawai tidak dapat mengakses Mail Bphn.go.id 2. Internal Kemenkumham dan masyarakat luas tidak dapat memberikan masukan dan menerima Informasi hukum melalui website Bphn.go.id	BPHN, Kementerian dan Masyarakat luas	1. Laporan Service Level Aggrement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	
69		Pengelolaan Teknologi Informasi Tidak Maksimal	Layanan SPBE tidak prima	Kepala BPHN	Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	Internal	C	Potensi SPBE tidak berjalan	BPHN, Kementerian dan Masyarakat luas	Kebijakan pimpinan dalam penggunaan TI yang bersinergi antara kegiatan yang ada	Layanan SPBE tidak prima	
70	0	Keterlambatan penerimaan SK KGB/KP/Fungsional dalam pengajuan Gaji	Keterlambatan pengajuan Kenaikan Gaji Berkala/Fungsional	Kepala BPHN	Keterlambatan penerimaan SK kenaikan pangkat/KGB/KP/ Fungsional dari Biro Kepegawaian membuat pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	Eksternal	UC	Keterlambatan pencairan gaji pegawai yang bersangkutan	Individu	Koordinasi intensif dengan Bagian Kepegawaian BPHN	Keterlambatan penerimaan SK KGB/KP/Fungsional	Risiko Operasional
71		Kurangnya data dukung dalam pengajuan usulan uang Lembur pegawai	Keterlambatan pengajuan uang lembur pegawai	Kepala BPHN	Pengajuan lembur pegawai kadang diusulkan lama setelah lembur selesai dilaksanakan	Internal	C	pengajuan usulan lembur pegawai tidak disetujui oleh KPA	Individu	Koordinasi intensif dengan pelaksana kegiatan lembur	Kurangnya data dukung dalam pengajuan usulan uang Lembur pegawai	Risiko Operasional
72		Kapasitas Generator Set tidak mencukupi seluruh kebutuhan listrik kantor	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	Kepala BPHN	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	Internal	C	Kinerja pegawai tidak optimal	BPHN	Pemeliharaan	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Jakarta, Februari 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
: 2023

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan rendah	Pasti	5	SOP Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum (PHN-OT.02.02-73) tidak memiliki daya ikat kepada pembuat kebijakan untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	Kementerian	5	25	Merah
2	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada	Hampir pasti	4	Keterlibatan seluruh Unit Eselon 2 yang ada di BPHN belum dapat memperkuat DPHN dalam penyelesaian permasalahan yang ada	Unit Eselon 1	4	16	Orange
3	Instansi Pembina belum dapat melakukan penyesuaian peraturan terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum dan petunjuk teknisnya	Hampir pasti	4	Koordinasi dengan Kementerian PAN RB dan BKN tidak memiliki daya ikat bagi instansi pembina dalam rangka pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum	Kementerian	5	20	Orange
4	Data dan informasi perkembangan maupun perubahan kebijakan pembinaan Analis Hukum belum komprehensif	Moderat	3	Sosialisasi dan Koordinasi dengan seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum, baik melalui rapat maupun penerbitan surat edaran belum ditindaklanjuti oleh instansi Pembina	Individu/Pegawai	1	3	Hijau
5	Ada beberapa RUU yang belum diselesaikan tepat waktu	Hampir Pasti	4	Hampir pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	20	Orange
6	Ada beberapa PP atau Perpres yang belum diselesaikan tepat waktu	Hampir Pasti	4	Hampir pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	20	Orange
7	Terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk menetapkan rancangan UU/PP/Perpres yang masuk ke dalam program perencanaan (Prolegnas di lingkungan Pemerintah/Progsun)	Hampir Pasti	4	Hampir pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	20	Orange
8	Masih terdapat daerah yang belum dapat dilakukan fasilitasi Prolegda oleh Kemenkumham	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	Orange
9	penambahan jangka waktu penyusunan naskah akademik	Moderat	3		kementerian	5	15	Kuning
10	rencana pembentukan undang-undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak selesai sesuai dengan target dalam Prolegnas	moderat	3		Kementerian	5	15	Kuning

11	naskah akademik yang dimohonkan penyalarsan tidak mencapai target yang ditetapkan	Kecil	2	Kecil kemungkinan terjadi dalam 1 tahun	Kementerian	5	10	Biru
12	Pelaksanaan kegiatan penyalarsan tidak tercapai sesuai target waktu	Moderat	3		Kementerian	5	15	Kuning
13	SPBE terkait penyalarsan NA tidak berjalan sebagaimana mestinya	Hampir Pasti	4	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian/Pemrakarsa	5	20	Orange
14	Proses memberikan disposisi permohonan penyalarsan NA dari Pemrakarsa ke BPHN menjadi lebih lama	Moderat	3	Dalam periode 1 tahun beberapakali terjadi dikarenakan Surat permohonan penyalarsan dan harmonisasi disampaikan dalam satu surat secara manual sehingga disposisi Menkumham hanya di tujukan kepada DitjenPP	Kementerian/Pemrakarsa	5	15	Kuning
15	Melakukan perbaikan isi NA disesuaikan dengan RUU yang sudah berubah	Moderat	3	Kecil terjadi dalam periode 1 tahun	Kementerian/Pemrakarsa	5	15	Kuning
16	Database dokumen hukum nasional yang lengkap belum dapat terwujud	Pasti	5	Anggota JDIHN belum menaati Perpres Nomor 33 Tahun 2012	Kementerian	5	25	Merah
17	Kepastian jumlah Anggota JDIHN yang terukur	Pasti	4	Adanya kebijakan pemerintah terkait pembentukan instansi	Kementerian	5	20	Orange
18	masih adanya keluhan dalam mekanisme penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	Kecil	2	masih banyak Anggota JDIHN yang belum memahami indikator penilaian kinerja JDIH	Unit Utama	4	8	Biru
19	Belum seluruhnya koleksi dokumen dan informasi hukum dapat dilayankan dengan baik	Pasti	5	kurangnya kualitas sumber daya dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan	Unit Utama	4	20	Orange
20	masih adanya kemungkinan keluhan mayarakat terhadap publikasi BPHN lainnya	Moderat	3	belum terinventarisasinya seluruh hasil terbitan publikasi BPHN yang telah disebarluaskan	Kementerian	5	15	Kuning
21	menurunnya nilai status saat reakreditasi ulang perpustakaan	Kecil	2	Kegiatan reakreditasi dilaksanakan minimal 3 tahun sekali	Unit Utama	4	8	Kuning
22	Sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan belum sesuai standar	Pasti	5	kurangnya dukungan anggaran dalam sarana prasarana pengelolaan layanan perpustakaan	Unit Utama	4	20	Orange
23	Database Dokumen Hukum Nasional yang lengkap belum dapat terwujud	Pasti	5	masih banyak Anggota JDIHN yang belum memiliki website JDIH sesuai standar Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019	Kementerian	5	25	Merah
24	Pengelolaan Website JDIH Anggota JDIHN belum sesuai dengan Standar Permenkumham 8/2019	Pasti	5	masih banyak Anggota JDIHN yang belum menaati Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019	Kementerian	5	25	Merah

25	Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa/Kel sehingga akan menghasilkan kesejahteraan dan berhasilnya membangun kepercayaan Negara Asing untuk membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia	Pasti	5	Kebijakan Pimpinan	Kementerian	5	25	Merah
26	Menyusun Peta Penyuluhan Hukum sebagai bahan dalam menyusun materi/tema penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tepat sasaran	Hampir Pasti	4	Kebutuhan	Kementerian	5	20	Orange
27	Persentase Penyuluh Hukum yang memenuhi standar kompetensi rendah	Moderat	3	Pemetaan kompetensi Penyuluh Hukum terkendala database yang tidak update	Kementerian	5	15	kuning
28	Jumlah Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang belum tersertifikasi	Hampir Pasti	4	penguatan tim Uji Kompetensi melalui identifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi belum cukup dan tetap diperlukan adanya sertifikasi	Kementerian	5	20	Orange
29	Pelaksanaan verifikasi permohonan bantuan hukum dapat terindikasi terjadinya gratifikasi maupun pungutan oleh verifikasi daerah	Moderat	3	Integritas petugas Verifikator	Kementerian	5	15	Kuning
30	Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi tidak merata	Hampir Pasti	4	Ketidaktifan Pemberi Bantuan Hukum	Kementerian	5	20	Orange
31	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh PBH	Hampir Pasti	4	Keterbatasan anggaran	Kementerian	5	20	Orange
32	Kehilangan data pegawai	Moderat	3	Masih terjadi kehilangan fisik data pegawai	Seluruh pegawai (BPHN)	4	12	Biru
33	Kehilangan data pegawai	Sangat kecil	1	Resiko terjadi bencana sangat kecil namun tetap ada	BPHN dan Kementerian	5	5	Hijau
34	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Pasti	5	Pada saat banyak pegawai mengakses, aplikasi SIMPEG lambat terutama pada saat akhir masa penghutungan tunkir dan penarikan data tunkir	Seluruh pegawai (BPHN)	4	20	Orange
35	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	Pasti	5	Masih ada pegawai yang tidak tertib dalam menginput Cuti, Izin, DL sehingga pelaporan uang makan dan absensi terlambat dilaksanakan	Seluruh pegawai (BPHN)	4	20	Orange
36	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Moderat	3	Masih ada peraturan yang kurang tersosialisasikan	BPHN	4	12	Biru
37	Peraturan baru kurang disosialisasikan	Moderat	3	Masih ada peraturan yang kurang tersosialisasikan	BPHN	4	12	Biru
38	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	Pasti	5	Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat sesuai kebutuhan dan kompetensinya	BPHN dan Kementerian	5	25	Merah
39	Pembayaran dan hak pegawai terlambat	Moderat	3	Masih ada keterlambatan SK KP dan Pensiun	Pegawai yang bersangkutan (BPHN)	1	3	Hijau

40	masih ada kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan terdapat kesalahan	Pasti	5	Masih masa penyesuaian	BPHN dan Kementerian	4	20	Orange
41	masih banyak pejabat yang bingung terhadap penyetaraan jabatan	Moderat	3	Resiko penyetaraan jabatan	Pejabat fungsional tertentu yang bersangkutan (UNIT ESELON I)	4	12	Kuning
42	masih adanya kekurangan pegawai	Pasti	5	Masih adanya formasi yang kosong	Seluruh pegawai (BPHN)	3	15	Kuning
43	masih perlu meningkatkan koordinasi	Kecil	2	Masih terjadi hal seperti itu	BPHN	4	8	Biru
44	Masih adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi dan promosi	Pasti	5		Kementerian	5	25	Merah
45	masih terdapat pegawai yang tidak menerapkan tata nilai, kode etik dan kode perilaku	Pasti	5		Kementerian	5	25	Merah
46	Masih terdapat usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Moderat	3	Dalam menyampaikan usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran masih ada yang belum berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku	Unit Eselon I	4	12	Kuning
47	Masih adanya Draft naskah dinas yang tidak sesuai dengan permenkumham No.31 Tahun 2020	Pasti	5		BPHN	4	20	Orange
48	Arsip rentan rusak dan hilang	Pasti	5		Kementerian	5	25	Merah
49	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	Moderat	3	proses pensistematisan masih terus dilakukan namun tetap saja terjadi kekurangan dalam pengklasifikasian dan penyimpanan arsip	Kementerian	5	15	Kuning
50	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	Moderat	3	masih terdapat sistem persuratan yang dilakukan secara manual/konvensional	Kementerian	5	15	Kuning
51	Kontributor di masing-masing pusat terkendala birokrasi terkait persetujuan dari atasan dalam memberikan bahan informasi kegiatan	Hampir pasti	4	Karena kontributor di pusat-pusat memiliki tugas pokok yang melekat	Unit Utama	5	20	Orange
52	Masih ada rencana kerjasama yang tidak melalui Kelompok Substansi kerjasama	Hampir pasti	4	Kurang taatnya pusat-pusat dalam mematuhi aturan terkait penyelenggaraan kerjasama	Unit Utama	5	20	Orange
53	Nilai SAKIP BPHN tidak mengalami peningkatan	Hampir Pasti	4	Rencana aksi yang telah disusun belum seluruhnya tuntas dilaksanakan	Kementerian	5	20	Orange
54	Nilai RB BPHN tidak mengalami peningkatan	Hampir Pasti	4	Rencana aksi pemenuhan data dukung RB yang telah disusun belum seluruhnya tuntas dilaksanakan	Kementerian	5	20	Orange

55	Penyusunan RPD disusun secara tidak cermat dan teliti	Pasti	5	Pelaksana kegiatan seringkali kurang berkoordinasi dengan pimpinan sehingga ketika terjadi perubahan kebijakan tidak dilakukan update RPD	Kementerian	5	25	Merah
56	Ketidaksesuai data realisasi anggaran di pelaksana kegiatan dengan di pengelola keuangan	Moderat	3	Pelaksana kegiatan seringkali tidak melakukan verifikasi atau pengarsipan RKAKL revisi terakhir serta realisasi pertanggungjawabn	Kementerian	5	15	Kuning
57	Dokumen usulan revisi dari pemangku kepentingan terjadi secara mendadak	Moderat	3	Adanya perubahan kebijakan organisasi dan pimpinan yang mengharuskan kegiatan segera berjalan	Kementerian	5	15	Kuning
58	Dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan aturan berlaku.	Pasti	5		Kementerian	5	25	Merah
59	Kurang efisiensi dan akuntabel dalam pengarsipan dokumen keuangan.	Pasti	4		Kementerian	5	20	Orange
60	Terhambatnya pencairan anggaran kegiatan.	Pasti	4		Kementerian	5	20	Orange
61	Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap	Hampir Pasti	4	Terdapat beberapa Satuan kerja BPHN yang terlambat dalam menyampaikan data dukung Laporan Keuangan	Kementerian	5	20	Orange
62	Aplikasi penyusunan laporan keuangan belum sempurna	Moderat	3	Penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan tergantung kepada Kementerian Keuangan	Kementerian	5	15	Kuning
63	Terhambatnya penyusunan Wasdal dan RKBMN	Hampir Pasti	4		Kementerian	5	20	Orange
64	Penumpukan barang rusak berat	Pasti	5		Kementerian	5	25	Merah
65	Aplikasi SAKTI yang belum sempurna	Hampir Pasti	4		Kementerian	5	20	Orange
66	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	moderat	3		Kementerian	5	15	Kuning
67	Layanan SPBE tidak prima	Hampir Pasti	4		BPHN	4	16	Orange
68	Keterlambatan penerimaan SK KGB/KP/Fungsional	Pasti	5	Lamanya proses administrasi dan penandatanganan SK oleh pejabat di Biro Kepegawaian	Individu pegawai	1	5	Hijau

69	Kurangnya data dukung dalam pengajuan usulan uang Lembur pegawai	Moderat	3	Adanya ketidaktelitian dan kesibukan pelaksana kegiatan dalam hal administrasi pengajuan lembur pegawai	Individu pegawai	1	3	Hijau
70	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	Pasti	5		BPHN	4	20	Orange



Jakarta, Februari 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko

: **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Periode Penerapan

: **2023**

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7	
1	Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan rendah	25	1	20	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan oleh K/L lebih kecil dibandingkan dengan jumlah output rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	Keputusan untuk memanfaatkan seluruh rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang disampaikan oleh BPHN sepenuhnya masih menjadi kewenangan K/L yang bersangkutan	21%
2	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tidak diadopsi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada	16	18	10	Perbedaan kepentingan atau cara pandang antar Kementerian/Lembaga (ego sektoral)	Pemanfaatan DPHN dalam penyelesaian permasalahan hukum sepenuhnya menjadi kebijakan K/L yang bersangkutan	1
3	Instansi Pembina belum dapat melakukan penyesuaian peraturan terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum dan petunjuk teknisnya	20	19	10	Perubahan sistem penilaian kinerja JF	Sistem penilaian kinerja JF yang sudah ada belum sejalan dengan sistem penilaian kinerja JF yang baru	80%
4	Data dan informasi perkembangan maupun perubahan kebijakan pembinaan Analis Hukum belum komprehensif	3	65	1	Tidak adanya sebuah sistem informasi yang dapat menjadi wadah informasi berkaitan dengan jabatan fungsional	Sistem informasi jabatan fungsional Analis Hukum harus disesuaikan dengan sistem penilaian kinerja JF yang baru	80%
5	Ada beberapa RUU yang belum diselesaikan tepat waktu	20	13	16	Capaian dalam Prolegnas tidak sesuai target yang direncanakan karena pemrakarsa belum siap substansi RUU nya		4
					Kewenangan untuk menentukan daftar RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dikoordinasikan oleh DPR sehingga tidak seluruh usulan pemerintah dapat disetujui DPR		
6	Ada beberapa PP atau Perpres yang belum diselesaikan tepat waktu	20	14	16	Dalam proses penyusunan RPP atau RPerpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar K/L terkait		4
7	Terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk menetapkan rancangan UU/PP/Perpres yang masuk ke dalam program perencanaan (Prolegnas di lingkungan Pemerintah/Progsun)	20	15	15	Belum ada pedoman pengendalian pengusulan RUU Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan pengusulan RPP/RPerpres		5
8	Masih terdapat daerah yang belum dapat dilakukan fasilitasi Prolegda oleh Kemenkumham	20	16	16	Fasilitasi Prolegda yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif karena pelibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah		4
9	penambahan jangka waktu penyusunan naskah akademik	15	40	2	data hasil penelitian/pengkajian terbatas		1
10	rencana pembentukan undang-undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak selesai sesuai dengan target dalam Prolegnas	15	41	2	Kewenangan penentuan RUU yang akan disusun ada pada unit eselon I lain di Kementerian Hukum dan HAM		1

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
11	naskah akademik yang dimohonkan penyelarasan tidak mencapai target yang ditetapkan	10	58	5	Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa		5
12	Pelaksanaan kegiatan penyelarasan tidak tercapai sesuai target waktu	15	44	10	Pemrakarsa lama dalam menetapkan kebijakan yang akan dituangkan dalam NA dan kurang memiliki komitmen dalam menindaklanjuti masukan		5
13	SPBE terkait penyelarasan NA tidak berjalan sebagaimana mestinya	20	17	15	Pemrakarsa tidak memiliki komitmen untuk memanfaatkan aplikasi Sirenkum		5
14	Proses memberikan disposisi permohonan penyelarasan NA dari Pemrakarsa ke BPHN menjadi lebih lama	15	45	10	Surat permohonan penyelarasan dan harmonisasi disampaikan dalam satu surat secara manual sehingga disposisi Menkumham hanya di tujuan kepada DitjenPP		5
15	Melakukan perbaikan isi NA disesuaikan dengan RUU yang sudah berubah	15	43	5	Perubahan kebijakan pemerintah		5
16	Database dokumen hukum nasional yang lengkap belum dapat terwujud	25	3	12	Belum semua Anggota JDIHN memahami Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Kurangnya pemahaman Anggota JDIHN terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2012	13
17	Kepastian jumlah Anggota JDIHN yang terukur	20	20	10	Adanya beberapa instansi Anggota JDIHN yang terbentuk karena kebutuhan kebijakan	Kebijakan pemerintah terkait pembentukan instansi	10
18	masih adanya keluhan dalam mekanisme penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	8	59	6	Adanya kolusi dalam penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	Kurangnya pemahaman Anggota JDIHN terkait indikator penilaian	2
19	Belum seluruhnya koleksi dokumen dan informasi hukum dapat dilayankan dengan baik	20	23	10	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum	Belum semua koleksi dokumen dan informasi hukum dapat terlayankan dengan baik	10
20	masih adanya kemungkinan keluhan mayarakat terhadap publikasi BPHN lainnya	15	46	10	Quality Control atas substansi publikasi BPHN belum maksimal	Tidak adanya koreksi final pada hasil publikasi BPHN	5
21	menurunnya nilai status saat reakreditasi ulang perpustakaan	8	60	5	Kurangnya kapasitas sumber daya (baik kualitas ataupun kuantitas) yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum	Pengelolaan Perpustakaan belum sesuai dengan SNP/ISO Bidang Perpustakaan	3

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
22	Sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan belum sesuai standar	20	24	10	Kurangnya dukungan Sarana Prasarana dalam pengolahan dan pelayanan perpustakaan	anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sarpras kecil	10
23	Database Dokumen Hukum Nasional yang lengkap belum dapat terwujud	25	3	12	Belum semua anggota JDIHN memiliki website JDIH	Anggota JDIHN belum melaksanakan kewajiban yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019	13
24	Pengelolaan Website JDIH Anggota JDIHN belum sesuai dengan Standar Permenkumham 8/2019	25	4	12	Pengelola JDIH anggota JDIHN belum memahami Standar Permenkumham 8/2019	Kurangnya pemahaman Anggota JDIH terkait Permenkumham Nomor 8 tahun 2019	13
25	Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa/Kel sehingga akan menghasilkan kesejahteraan dan berhasilnya membangun kepercayaan Negara Asing untuk membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia	25	2	25	Banyaknya program pembentukan Desa/Kel yang dilaksanakan pada K/L sehingga pembentukan Desa/Kel Sadar Hukum ditingkat pemerintah pusat dan daerah sangat sulit hal ini karena masing-masing K/L menjalankan program Desa/Kel yang tidak dikordinir oleh salah satu K/L	Lambatnya pembentukan dan peresmian Desa/Kel yang diakibatkan K/L memiliki Program Desa/Kel sehingga adanya Kebijakan dari Presiden untuk menetapkan salah satu K/L yang menjadi koordinator pelaksanaan pembentukan, pembinaan dan peresmian Desa/Kel Sadar Hukum	8
26	Menyusun Peta Penyuluhan Hukum sebagai bahan dalam menyusun materi/tema penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tepat sasaran	20	21	20	Belum disusunnya materi/tema penyuluhan hukum nasional yang akan digunakan sebagai materi/tema yang wajib dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum baik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi Pengguna JF Penyuluh Hukum	Belum adanya materi/tema penyuluhan hukum nasional yang wajib dilaksanakan pada kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung	5
27	Persentase Penyuluh Hukum yang memenuhi standar kompetensi rendah	15	47	10	belum adanya pemetaan kompetensi JF Penyuluh Hukum	pemetaan kompetensi JF Penyuluh Hukum terkendala database yang tidak update sehingga pemetaan yang dilakukan belum menyeluruh	5
28	Jumlah Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang belum tersertifikasi	20	22	15	belum adanya Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang tersertifikasi	belum adanya mekanisme sertifikasi Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum	5
29	Pelaksanaan verifikasi permohonan bantuan hukum dapat terindikasi terjadinya gratifikasi maupun pungutan oleh verifikasi daerah	15	48	10	Kurangnya integritas dari Tim Verifikator daerah dalam pelaksanaan berkas permohonan bantuan hukum	Perlunya penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum serta melaksanakan pembinaan terhadap verifikasi wilayah	5
30	Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi tidak merata	20	25	15	Kurangnya pemahaman PBH terkait pentingnya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan lebih mengutamakan bantuan hukum litigasi	Perlunya peningkatan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	5
31	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh PBH	20	26	15	Pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima bantuan hukum	Pengawasan dilakukan dalam rangka menilai kinerja serta kualitas layanan OBH dalam memberikan bantuan hukum	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
32	Kehilangan data pegawai	12	53	4	Kelalaian pegawai saat mengarsipkan atau menyimpan dokumen	Terjadi jika pengelola kepegawaian kurang teliti	8
33	Kehilangan data pegawai	5	63	4	bencana alam seperti kebakaran dan banjir	Resiko terjadi bencana sangat kecil namun tetap ada	1
34	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	20	27	8	Load server simpeg tinggi	Terjadi jika banyak pegawai yang mengakses terutama di akhir masa perhitungan tunkir	12
35	Kehadiran pegawai terlambat direkapitulasi	20	28	8	Pegawai terlambat menginput izin, DL, Cuti ke dalam SIMPEG	Terjadi jika pegawai kurang disiplin	12
36	Peraturan baru kurang disosialisasikan	12	54	4	kurang responsif	Terjadi jika pengelola kepegawaian kurang responsif	8
37	Peraturan baru kurang disosialisasikan	12	55	4	kurang koordinasi antar instansi	Terjadi jika pengelola kepegawaian kurang koordinasi	8
38	pengembangan pegawai tidak tepat sasaran, pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana	25	9	20	Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan	Kurangnya pengetahuan dalam melaksanakan analisis kebutuhan diklat menyebabkan diklat yang dilaksanakan/ diusulkan tidak tepat sasaran / tidak terlaksana	5
39	Pembayaran dan hak pegawai terlambat	3	66	4	Biro kepegawaian lama dalam menerbitkan SK	Terjadi jika pegawai tidak mengecek secara rutin data kepegawaianya di Simpeg, sehingga apabila pegawai memiliki data terbaru segera disampaikan ke bagian kepegawaian untuk diproses digitalisasi	-1
40	masih ada kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan terdapat kesalahan	20	10	12	Aplikasi Simpeg belum mengakomodir evaluasi kinerja sesuai Permenpan 6 Tahun 2022	Terjadi jika belum dibuat aplikasi evaluasi kinerja pegawai	8
41	masih banyak pejabat yang bingung terhadap penyetaraan jabatan	12	56	8	belum optimalnya hasil penyetaraan jabatan	Terjadi saat penyetaraan jabatan	4
42	masih adanya kekurangan pegawai	15	49	12	rekrutmen yang diadakan tidak sesuai dengan usulan jumlah kebutuhan	Terjadi saat rekrutmen tidak dilakukan sesuai formasi	3

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
43	masih perlu meningkatkan koordinasi	8	61	6	kurangnya memperhatikan kebutuhan organisasi saat mutasi	Terjadi saat rekrutimen tidak dilakukan sesuai formasi	2
44	Masih adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi dan promosi	25	7	8	Proses pengusulan mutasi dan promosi tidak transparan	Terjadi saat adanya kesempatan dalam penyalahgunaan wewenang	17
45	masih terdapat pegawai yang tidak menerapkan tata nilai, kode etik dan kode perilaku	25	8	8	Adanya kebutuhan pegawai agar proses pengurusan berkas kepegawaian dipercepat	Terjadi kalau pimpinan kurang mengawasi	17
46	Masih terdapat usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	12	57	9	Satuan kerja belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran	Satuan kerja belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran dari setiap tahapan penyusunan	95%
47	Masih adanya Draft naskah dinas yang tidak sesuai dengan permenkumham No.31 Tahun 2020	20	30	15	Kurangnya pemahaman mengenai tata naskah dinas		5
48	Arsip rentan rusak dan hilang	25	11	20	- Terjadinya kehilangan arsip yang belum masuk daftar arsip - Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan arsip dalam ruang arsip - Kurangnya pengetahuan tentang jenis arsip		5
49	klasifikasi dan penyimpanan arsip yang kurang sistematis	15	50	12	pemahaman kearsipan yang masih kurang	pengelola arsip belum mengikuti diklat arsiparis	3
50	surat menyurat melalui sisumaker tidak optimal	15	42	4	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	penggunaan aplikasi sumaker belum optimal	1
51	Kontributor di masing-masing pusat terkendala birokrasi terkait persetujuan dari atasan dalam memberikan bahan informasi kegiatan	20	37	16	Kurang aktifnya kontributor humas di masing-masing pusat	Kontributor Humas kurang aktif dikarenakan setiap kontributor mempunyai tugas yang melekat di pusat masing-masing	4
52	Masih ada rencana kerjasama yang tidak melalui Kelompok Substansi kerjasama	20	38	16	Kurang taatnya pusat-pusat dalam mematuhi aturan terkait penyelenggaraan kerjasama	Pusat-pusat melakukan pendekatan atau komunikasi informal membahas rencana kerjasama (komunikasi dilakukan secara keruangan dan melalui alat komunikasi)	4
53	Nilai SAKIP BPHN tidak mengalami peningkatan	20	31	15	rekomendasi hasil reuiu APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti	sebagian rekomendasi yang disampaikan oleh APIP baru dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, sebagian lainnya sangat bergantung pada kebijakan organisasi	80 (nilai A)

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
54	Nilai RB BPHN tidak mengalami peningkatan	20	32	15	Persentase data dukung RB yang dinyatakan sesuai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah data dukung RB yang dipenuhi	data dukung yang dipenuhi tidak seluruhnya sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan hasil review dari Tim Penilai Internal	35,00
55	Penyusunan RPD disusun secara tidak cermat dan teliti	25	5	20	Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan kalender kerja yang telah disusun	Pelaksana kegiatan tidak memperhatikan kalender kerja dengan pelaksanaan kegiatan	
56	Ketidaksesuaian data realisasi anggaran di pelaksana kegiatan dengan di pengelola keuangan	15	68		Pelaksana kegiatan belum menggunakan data RKAKL revisi terakhir saat penginputan di matrik semula menjadi	Dalam menyusun matrik semula menjadi, pelaksana kegiatan tidak didukung data yang valid seperti RKAKL revisi terakhir dan realisasi dari bendahara atau pengelola keuangan	
57	Dokumen usulan revisi dari pemangku kepentingan terjadi secara mendadak	15	69		Beban server aplikasi SAKTI di kemenkeu menjadi tinggi karena banyak diakses oleh seluruh satker di K/L	usulan revisi anggaran kadang tidak berbarengan dan mendadak sehingga mendekati atau kadang melewati batas akhir revisi RPD di Kemenkeu	
58	Dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan aturan berlaku.	25	6	20	Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan terkait tata cara pembayaran.	Dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan kurang memperhatikan butir butir aturan yang terdapat pada peraturan yang berlaku.	0
59	Kurang efisiensi dan akuntabel dalam pengarsipan dokumen keuangan.	20	33	15	Kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan dalam ketepatan waktu mempertanggungjawabkan dokumen keuangan.	LS yang sudah dibayarkan dimuka dianggap sudah selesai oleh pelaksana kegiatan yang mengakibatkan lamanya pengembalian dokumen pertanggungjawaban keuangan.	0
60	Terhambatnya pencairan anggaran kegiatan.	20	34	15	Aplikasi down dan error dari server kemenkeu.	Maintenance dan trial error dari server kemenkeu.	0
61	Dokumen pendukung laporan keuangan tidak lengkap	20	39	20	Data dukung penyusunan laporan keuangan tidak diserahkan tepat waktu	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pelaksana kegiatan kurang berkoordinasi terkait data dukung kegiatan	5
62	Aplikasi penyusunan laporan keuangan belum sempurna	15	52	20	Pergantian aplikasi penyusunan laporan keuangan	Migrasi data antara aplikasi yang lama dengan aplikasi yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama.	5
63	Terhambatnya penyusunan Wasdal dan RKBMN	20	29	10	update data SIMAN yang lama dari aplikasi SAKTI		5
64	Penumpukan barang rusak berat	25	12	20	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan/KPKNL		5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6		7
65	Aplikasi SAKTI yang belum sempurna	20	35	15	Masih sering terjadi error dan proses pembaharuan aplikasi yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan		5
66	Informasi Kegiatan BPHN tidak dapat di tampilkan dalam website	15	51	12	Provider		3
67	Layanan SPBE tidak prima	16	70	12	Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit		4
68	Keterlambatan penerimaan SK KGB/KP/Fungsional	5	64		Keterlambatan penerimaan SK kenaikan pangkat/KGB/KP/ Fungsional dari Biro Kepegawaian membuat pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	Proses administrasi dan penandatanganan pejabat terkait baik di Biro Kepegawaian maupun Setneg yang lama	
69	Kurangnya data dukung dalam pengajuan usulan uang Lembur pegawai	3	67		Pengajuan lembur pegawai kadang diusulkan lama setelah lembur selesai dilaksanakan	Pelaksana kegiatan kadang suka tidak cermat dan teliti dalam pengajuan usulan lembur	
70	Kegiatan perkantoran tidak terlaksana pada saat terjadi pemadaman listrik	20	36	15	Penggantian generator set belum dapat terlaksana		5

Jakarta, Februari 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko
Periode Penerapan

: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
: 2023

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan oleh K/L lebih kecil dibandingkan dengan jumlah output rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	21%	Mengurangi Risiko	Menyusun Peraturan yang lebih mengikat K/L untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum dalam membentuk atau menyusun kebijakan	Peraturan Presiden	1	Desember 2023	Pusat ANEV	Peraturan Presiden tidak ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan
2	Perbedaan kepentingan atau cara pandang antar Kementerian/Lembaga (ego sektoral)	100%	Mengurangi Risiko	Pelibatan secara aktif Kementerian/Lembaga seperti Bappenas dan Kementerian Koordinator dalam penyusunan DPHN dalam keanggotaan Pokja	Buku DPHN	1	Desember 2023	Pusat ANEV	K/L masih belum memandang pentingnya DPHN dalam perencanaan pembangunan nasional
3	Perubahan sistem penilaian kinerja JF	80%	Mengurangi Risiko	Peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Hukum	Laporan	1	Desember 2023	Pusat ANEV	-
4	Tidak adanya sebuah sistem informasi yang dapat menjadi wadah informasi berkaitan dengan jabatan fungsional	80%	Mengurangi Risiko	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Hukum	Aplikasi	1	Desember 2023	Pusat ANEV	Aplikasi sistem informasi JF Analis Hukum tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan
5	Capaian dalam Prolegnas tidak sesuai target yang direncanakan karena pemrakarsa belum siap substansi RUU nya	4	Mengurangi Risiko	1. Menambah frekuensi rapat koordinasi 2. Membuat komitmen dengan K/L pemrakarsa 3. Pemantauan melalui aplikasi Sirenkum	1. Jumlah rapat koordinasi dengan K/L pemrakarsa 2. Surat komitmen penyelesaian RUU dari K/L pemrakarsa 3. Laporan indeks kinerja K/L yang akan disampaikan ke Presiden melalui KSP			PUSREN	Telah dilakukan rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi Pemrakarsa RUU.
6	Kewenangan untuk menentukan daftar RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dikoordinasikan oleh DPR sehingga tidak seluruh usulan pemerintah dapat disetujui DPR	0	Mengurangi Risiko				Januari s.d. Desember	PUSREN	Telah dilakukan Rapat dengan tenaga ahli DPR
7	Dalam proses penyusunan RPP atau RPerpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar K/L terkait	4	Mengurangi Risiko					PUSREN	Telah dilakukan Rapat Antar Kementerian dan Lembaga guna mempercepat Penyusunan RPP dan Rperpres
8	Belum ada pedoman pengendalian pengusulan RUU Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan pengusulan RPP/RPerpres	5	Mengurangi Risiko	Menyusun pedoman pengusulan RUU Prolegnas Jangka Menengah di lingkungan pemerintah	Pedoman pengusulan RUU Prolegnas Jangka Menengah di lingkungan pemerintah		Juni s.d. Desember	PUSREN	Sedang disusun Pedoman pengendalian PengusulanRUU Prolegnas di lingkungan pemerintah dan pengusulan RPP/Rperpres
9	Fasilitasi Prolegda yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif karena pelibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah	4	Mengurangi Risiko	Menambah koordinasi dengan Kanwil dan Pemda	Jumlah rapat koordinasi		Januari s.d. Desember	PUSREN	Telah Disusun pedoman Prolegnas agar kanwil membentuk tim Proleda yang melibatkan Pemerintah Daerah
10	data hasil penelitian/pengkajian terbatas	1	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	Laporan rapat koordinasi dan laporan kegiatan diskusi		Januari, Juni	PUSREN	
11	Kewenangan penentuan RUU yang akan disusun ada pada unit eselon I lain di Kementerian Hukum dan HAM	1	Mengurangi Risiko	melakukan koordinasi dengan unit eselon I yang memiliki kewenangan penyusunan RUU	Laporan rapat koordinasi		Januari, Juni	PUSREN	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Perubahan fokus penyusunan RUU pada unit teknis yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan substansi pengaturan	1		Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	Laporan rapat koordinasi		Januari, Juni	PUSREN	
13	Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa	5	Mengurangi Risiko	Melakukan pemetaan terhadap RUU Prakarsa Pemerintah yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan Memperkirakan jumlah RUU DKT	Daftar pemetaan RUU Prakarsa Pemerintah yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan jumlah RUU DKT		Januari s.d. Desember	PUSREN	Pemrakarsa belum menyelesaikan proses penyusunan NA dan RUU
14	Pemrakarsa lama dalam menetapkan kebijakan yang akan dituangkan dalam NA dan kurang memiliki komitmen dalam menindaklanjuti masukan	5	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi dengan pemrakarsa	Jumlah koordinasi		Januari s.d. Desember	PUSREN	Pemrakarsa belum menyepakati politik hukum yang akan diambil
15	Pemrakarsa tidak memiliki komitmen untuk memanfaatkan aplikasi Sirekum	5	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemrakarsa	Jumlah koordinasi		Januari s.d. Desember	PUSREN	Proses Pengajuan Penyelarasan oleh pemrakarsa menempuh pendekatan langsung tingkat pimpinan
16	Surat permohonan penyelarasan dan harmonisasi disampaikan dalam satu surat secara manual sehingga disposisi Menkumham hanya di tujukan kepada DitjenPP	5	Mengurangi Risiko	Melakukan pemantauan kepada staf Menkumham terkait dengan disposisi Menkumham	Jumlah koordinasi		Januari s.d. Desember	PUSREN	Pemrakarsa tidak mematuhi atau memperhatikan himbauan untuk memisah permohonan penyelarasan dalam surat permohonan tersendiri
17	Perubahan kebijakan pemerintah	5	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi/pendampingan dengan pemrakarsa sesuai dengan kebijakan pemerintah	Jumlah koordinasi		Januari s.d. Desember	PUSREN	
18	Belum semua Anggota JDIHN memahami Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	13	Mengurangi Risiko	Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2012	Laporan dan dokumentasi	5	Feb s.d Mar	Pusat JDIHN	-
19	Adanya beberapa instansi Anggota JDIHN yang terbentuk karena kebutuhan kebijakan	10	Mengurangi Risiko	Meningkatkan koordinasi antara BPHN dengan instansi terkait	UANG Rapat Tim Pembina JDIHN	5	Feb s.d Okt	Pusat JDIHN	
20	Adanya kolusi dalam penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	2	Mengurangi Risiko	Memperbaiki dan menyebarluaskan indikator penilaian	Juknis	1	Okt s.d Des	Pusat JDIHN	
21	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum	10	Mengurangi Risiko	Meningkatkan kualitas sumber bahan pemustaka dan sumber daya pendukung lainnya	Hasil IKM per semester	2	Jan s.d Des	Pusat JDIHN	
22	Quality Control atas substansi publikasi BPHN belum maksimal	5	Mengurangi Risiko	Menerbitkan penarikan atas publikasi BPHN yang bermasalah	Surat Edaran	1	Desember	Pusat JDIHN	
23	Kurangnya kapasitas sumber daya (baik kualitas ataupun kuantitas) yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum	3	Mengurangi Risiko	Melakukan evaluasi dan perbaikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan untuk memenuhi standar yang ditetapkan	Laporan dan dokumentasi	1	Desember	Pusat JDIHN	
24	Kurangnya dukungan Sarana Prasarana dalam pengolahan dan pelayanan perpustakaan	10	Mengurangi Risiko	Mengupayakan koordinasi dengan unit lain untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dan melakukan usulan anggaran untuk kebutuhan sarpras	Surat Permohonan	1	Desember	Pusat JDIHN	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Belum semua anggota JDIHN memiliki website JDIH	13	Mengurangi Risiko	- Melakukan Sosialisasi Perpres 33/2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 serta - Promosi Program Percepatan Integrasi (PROPESI)	Laporan dan dokumentasi	2	Maret	Pusat JDIHN	
26	Pengelola JDIH anggota JDIHN belum memahami Standar Permenkumham 8/2019	13	Mengurangi Risiko	Meningkatkan kompetensi pengelola JDIH Anggota JDIHN melalui Workshop Pemahaman Standar Pengelolaan JDIH dan Validasi Dokumen Hukum JDIHN	Laporan	1	Mei dan Juni	Pusat JDIHN	
27	Banyaknya program pembentukan Desa/Kel yang dilaksanakan pada K/L sehingga pembentukan Desa/Kel Sadar Hukum ditingkat pemerintah pusat dan daerah sangat sulit hal ini karena masing-masing K/L menjalankan program Desa/Kel yang tidak dikordinir oleh salah satu K/L	8	Mengurangi resiko	Membuat aturan presiden terkait kebijakan yg mengatur/mengkoordinir program pembentukan Desa/Kel, meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan Anggaran pembentukan/pembinaan dan Monev DSH	Menetapkan Kebijakan terkait Koordinator Pelaksanaan Program yang di keluarkan oleh Presiden, Peningkatan Jumlah Pembentukan/Peresmian DSH	2	Januari November	Pusluh	Output 1 hubungannya dengan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden terkait kebijakan yg mengatur/mengkoordinir program pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum masih dalam proses dari awal tahun sesuai arah kebijakan pimpinan tidak sektoral dalam tiap Pusat namun digabung untuk keseluruhan Tugas Fungsi 4 (empat) Pusat yang ada di BPHN, Output 2 hubungannya dengan Monitoring / Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum..setelah dilakukan Monev secara administrasi pada semester 1 tahun 2022, tahun ini lakukan tindak lanjut dalam bentuk Pemantauan/Evaluasi faktual terhadap hasil Monev Administrasi dan telah tertuang dalam Target Kinerja Kantor Wilayah dengan timeline penyelesaian pada triwulan III Tahun 2023 / B09
28	Belum disusunnya materi/tema penyuluhan hukum nasional yang akan digunakan sebagai materi/tema yang wajib dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum baik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi Pengguna JF Penyuluh Hukum	5	Memindahkan	Menyusun Peta Penyuluhan Hukum	Materi / Tema Penyuluhan Hukum	2	Januari - Oktober	Pusluh	Pedoman tidak ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan
29	belum adanya pemetaan kompetensi JF Penyuluh Hukum	5	mengurangi risiko	menyusun sistem informasi database penyuluh hukum berbasis digital	Dokumen Pemetaan kompetensi	1	December 2023	Pusluh	Dokumen tidak ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan
30	belum adanya Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang tersertifikasi	5	mengurangi risiko	menyusun mekanisme sertifikasi Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum	Pedoman Sertifikasi	1	December 2024	Pusluh	Pedoman tidak ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan
31	Kurangnya integritas dari Tim Verifikator daerah dalam pelaksanaan berkas permohonan bantuan hukum	5	Mengurangi Risiko	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	1	Januari - Desember	Pusluh	-
32	Kurangnya pemahaman PBH terkait pentingnya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan lebih mengutamakan bantuan hukum litigasi	5	Mengurangi Risiko	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	1	Januari - Desember	Pusluh	-
33	Pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima bantuan hukum	5	Mengurangi Risiko	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	1	Januari - Desember	Pusluh	-
34	Kelalaian pegawai saat mengarsipkan atau menyimpan dokumen	8	Mengurangi Resiko	Melakukan scanning data dan Updating Data pertriwulan	Laporan Jumlah data yang di scan pertriwulan	4	B03,B06,B09,B12	Sekretariat BPHN	
35	bencana alam seperti kebakaran dan banjir	1	Mengurangi Resiko	Melakukan scanning data dan Updating Data pertriwulan	Laporan Jumlah data yang di scan pertriwulan	4	B03,B06,B09,B12	Sekretariat BPHN	
36	Load server simpeg tinggi	12	Mengurangi Resiko	Mengusulkan penambahan <i>bandwidth</i> internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Usulan Kapasitas <i>bandwidth</i> internet	1	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	

No	Indikator Risiko		Ops Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Pegawai terlambat menginput izin, DL, Cuti ke dalam SIMPEG	12	Mengurangi Risiko	Membuat pemberitahuan notifikasi setiap bulan pada media sosial whatsapp BPHN	Laporan	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
38	kurang responsif	8	Mengurangi Risiko	Meningkatkan responsif terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Monitoring peraturan / kebijakan	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
39	kurang koordinasi antar instansi	8	Mengurangi Risiko	Meningkatkan koordinasi terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Koordinasi dengan instansi terkait	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
40	Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM tidak sesuai ddengan kebutuhan yang diusulkan	5	Mengurangi Risiko	Bimtek Analis Kebutuhan Diklat	Laporan bimtek analisis kebutuhan diklat	1	Desember	Sekretariat BPHN	
41	Biro kepegawaian lama dalam menerbitkan SK	-1	Mengurangi Risiko	Melaksanakan koordinasi yang intens dengan biro kepegawaian	Jumlah data yang diupdate	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
42	Aplikasi Simpeg belum mengakomodir evaluasi kinerja sesuai Permenpan 6 Tahun 2022	8	Mengurangi Risiko	Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap dokumen evaluasi kinerja pegawai	Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai	12	Triwulan I, II, III, IV	Sekretariat BPHN	
43	belum optimalnya hasil penyetaraan jabatan	4	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi terkait penyetaraan jabatan	Laporan sosialisasi penyetaraan jabatan	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
44	rekrutmen yang diadakan tidak sesuai dengan usulan jumlah kebutuhan	3	Mengurangi Risiko	menempatkan pegawai baru sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi	Penerimaan pegawai	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
45	kurangnya memperhatikan kebutuhan organisasi saat mutasi	2	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi dalam proses mutasi	Mutasi sesuai dengan keb	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
46	Proses pengusulan mutasi dan promosi tidak transparan	17	Mengurangi Risiko	Pemantauan secara berkala oleh pimpinan	SK terkait mutasi dan promosi	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
47	Adanya kebutuhan pegawai agar proses pengurusan berkas kepegawaian dipercepat	17	Mengurangi Risiko	Melakukan internalisasi kepada seluruh pegawai	Sosialisasi Tata nilai PASTI, kode etik dan kode perilaku pegawai	1	Desember	Sekretariat BPHN	
48	Satuan kerja belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran	95%	Mengurangi Risiko	Melakukan penelitian atau penelaahan atas usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran dari seluruh satuan kerja	Dokumen hasil penelitian atau penelaahan	4	Januari s/d Oktober 2023	Sekretariat BPHN	-
49	Kurangnya pemahaman mengenai tata naskah dinas	5	Mengurangi Risiko	Sosialisasi tata naskah dinas	Koordinasi dengan instansi terkait	1	Agustus	Sekretariat BPHN	
50	- Terjadinya kehilangan arsip yang belum masuk daftar arsip - Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan arsip dalam ruang arsip - Kurangnya pengetahuan tentang jenis arsip	5	Mengurangi Risiko	Mengajukan Anggaran untuk Ruang Arsip Baru yang tahan air dan api	Usulan anggaran	1	Oktober	Sekretariat BPHN	
51	pemahaman kearsipan yang masih kurang	3	Mengurangi Risiko	sosialisasi tata kelola kearsipan	pengelompokan arsip sesuai dengan klasifikasi pengarsipan	1	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
52	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	1	Mengurangi Risiko	sosialisasi sisumaker	penggunaan sisumaker secara aktif	12	Januari s.d. Desember	Sekretariat BPHN	
53	Kurang aktifnya kontributor humas di masing-masing pusat	4	Mengurangi Risiko	Menekankan kembali terkait tanggungjawab kontributor melalui bersurat secara resmi ke atasan masing-masing kontributor	Rapat Koordinasi Kontributor Humas		April	Sekretariat BPHN	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Kurang taatnya pusat-pusat dalam mematuhi aturan terkait penyelenggaraan kerjasama	4	Mengurangi Risiko	Melaporkan permasalahan kerjasama kepada Sekretaris BPHN	Koordinasi dengan pimpinan		April	Sekretariat BPHN	
55	rekomendasi hasil reviu APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti	80 (nilai A)	Mengurangi Risiko	Perbaiki Dokumen LAKIP dan Melakukan reviu terhadap RENSTRA BPHN dan usul perubahannya ke tingkat kementerian	Konsep LAKIP dan hasil reviu internal RENSTRA BPHN	2	Desember 2023	Sekretariat BPHN	
56	Persentase data dukung RB yang dinyatakan sesuai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah data dukung RB yang dipenuhi	35,00	Mengurangi Risiko	Membuat dokumen rencana aksi dan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan Berita Acara hasil review TPI	Dokumen rencana aksi tindaklanjut hasil review TPI	1	Desember 2023	Sekretariat BPHN	
57	Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan kalender kerja yang telah disusun	0%	Mengurangi Risiko	Menyusun update revisi RPD setiap Triwulan dengan pemangku kepentingan	Revisi RPD	4	Februari, April, Juli, Oktober 2023	Sekretariat BPHN	
58	Pelaksana kegiatan belum menggunakan data RKAKL revisi terakhir saat penginputan di matrik semula menjadi	0	Mengurangi Risiko	Penyebaruasaan dokumen RKAKL hasil revisi dan realisasi SAKTI secara update	Dokumen RKAKL revisi dan realisasi SAKTI	4	B03, B06, B09, B12	Sekretariat BPHN	
59	Beban server aplikasi SAKTI di kemenkeu menjadi tinggi karena banyak diakses oleh seluruh satker di K/L	0	Mengurangi Risiko	Penginputan revisi dilakukan di awal dan koordinasi dengan Kanwil DjPb DKI Jakarta	Capture konsultasi by WA	4	Februari, April, Juli, Oktober 2023	Sekretariat BPHN	
60	Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan terkait tata cara pembayaran.	0	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi terkait peraturan tata cara pembayaran yang berlaku.	Laporan dan dokumentasi kegiatan	12	Desember 2023	Sekretariat BPHN	
61	Kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan dalam ketepatan waktu mempertanggungjawabkan dokumen keuangan.	0	Mengurangi Risiko	Melakukan reward and Punishment untuk pelaksana kegiatan.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan.	12	Desember 2023	Sekretariat BPHN	
62	Aplikasi down dan error dari server kemenkeu.	0	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan KPPN V via hai CSO dan konsultasi tatap muka terkait masalah yang dihadapi.	Hasil capture hai CSO dan jawaban dari Pembina teknis Perbendaharaan Negara.	12	Desember 2023	Sekretariat BPHN	
63	Data dukung penyusunan laporan keuangan tidak diserahkan tepat waktu	5	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan	Nota Dinas	1	Januari dan Juni	Sekretariat BPHN	
64	Pergantian aplikasi penyusunan laporan keuangan	5	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan	Laporan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan	1	Januari dan Juni	Sekretariat BPHN	
65	update data SIMAN yang lama dari aplikasi SAKTI	5	Mengurangi Risiko	Melakukan Follow Up ke Biro BMN	Kordinasi dengan pihak terkait	2	Februari dan Juli	Sekretariat BPHN	
66	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan/KPKNL	5	Mengurangi Risiko	Melakukan Follow Up ke Biro BMN	Kordinasi dengan pihak terkait	1	Oktober	Sekretariat BPHN	
67	Masih sering terjadi error dan proses pembaharuan aplikasi yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan	5	Mengurangi Risiko	Kementerian	Melaksanakan Bimtek dengan mengundang narasumber yang berkompeten	1	Januari dan Juni	Sekretariat BPHN	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Provider	3	Mengurangi Resiko	1. Laporan Service Level Agreement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Penyusunan Laporan tiap triwulan	2	September, Desember	Sekretariat BPHN	
69	Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	4	Mengurangi Resiko	Kebijakan pengelolaan SPBE BPHN	Pembentukan SK SPBE	1	Oktober	Sekretariat BPHN	
70	Keterlambatan penerimaan SK kenaikan pangkat/KGB/KP/ Fungsional dari Biro Kepegawaian membuat pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	0	Mengurangi Resiko	Koordinasi dengan Bagian kepegawaian	Dokumen SK	2	April dan Oktober 2023	Sekretariat BPHN	
71	Pengajuan lembur pegawai kadang diusulkan lama setelah lembur selesai dilaksanakan	0	Mengurangi Resiko	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan Lembur	Nota Dinas	1	Januari 2023	Sekretariat BPHN	
72	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	5	Mengurangi Resiko	Mengusulkan anggaran untuk generator set baru	Usulan anggaran	1	Oktober	Sekretariat BPHN	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Jakarta, Februari 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Periode Penerapan : 2023

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Menyusun Peraturan yang lebih mengikat K/L untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum dalam membentuk atau menyusun kebijakan	Peraturan Presiden	1	1	100,00	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan oleh K/L lebih kecil dibandingkan dengan jumlah output rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	21%		0,00	0,00	Berdasarkan pembahasan dengan Ditjen PP dan Setneg disepakati untuk memasukkan substansi RPerpres mengenai Pemantauan dan Peninjauan/AE dimasukkan kedalam Revisi Perpres 87 Tahun 2014 yang juga sedang disusun
2	Pelibatan secara aktif Kementerian/Lembaga seperti Bappenas dan Kementerian Koordinator dalam penyusunan DPHN dalam keanggotaan Pokja	Buku DPHN	1	0,5	50,00	Perbedaan kepentingan atau cara pandang antar Kementerian/Lembaga (ego sektoral)	1		0,00		Sedang dalam proses penyusunan Buku DPHN. Telah ada pelibatan dalam keanggotaan Pokja: 1. aktif dan berkontribusi: Kementerian PPN/Bappenas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2. aktif hadir tapi belum berkontribusi aktif: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, 3. belum terlibat aktif: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
3	Peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Laporan	1	0,5	50,00	Perubahan sistem penilaian kinerja JF	80%		0,00	0,00	- sudah dilaksanakan profiling JF AH. - laporan dalam proses penyusunan - sudah dilaksanakan diklat AH angkatan I kerja sama dengan BPSDM
4	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Aplikasi	1	0	0,00	Tidak adanya sebuah sistem informasi yang dapat menjadi wadah informasi berkaitan dengan jabatan fungsional	80%		0,00		- masih tahap rancang bangun - harus kerja sama dengan pusdatin
5	1. Menambah frekuensi rapat koordinasi 2. Membuat komitmen dengan K/L pemrakarsa 3. Pemantauan melalui aplikasi Sirenkum	1. Jumlah rapat koordinasi dengan K/L pemrakarsa 2. Surat komitmen penyelesaian RUU dari K/L pemrakarsa 3. Laporan indeks kinerja K/L yang akan disampaikan ke Presiden melalui KSP	1	0	0,00	Capaian dalam Prolegnas tidak sesuai target yang direncanakan karena pemrakarsa belum siap substansi RUU nya	4		0,00		Menunggu laporan B06 pada akhir Juni
6	0	0	0		#DIV/0!	Kewenangan untuk menentukan daftar RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dikoordinasikan oleh DPR sehingga tidak seluruh usulan pemerintah dapat disetujui DPR	0		#DIV/0!		
7	0	0	0		#DIV/0!	Dalam proses penyusunan RPP atau RPerpres sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar K/L terkait	4		0,00		
8	Menyusun pedoman pengusulan RUU Prolegnas Jangka Menengah di lingkungan pemerintah	Pedoman pengusulan RUU Prolegnas Jangka Menengah di lingkungan pemerintah	1	0	0,00	Belum ada pedoman pengendalian pengusulan RUU Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan pengusulan RPP/RPerpres	5		0,00	0,00	Selena sudah ada bukunya namun saat ini masih pengembangan dan menerima masukan dari narsum, arahnya diterapkan untuk jangka menengah tahun depan
9	Menambah koordinasi dengan Kanwil dan Pemda	Jumlah rapat koordinasi	1	3	300,00	Fasilitasi Prolegda yang dilakukan oleh Kanwil bersifat pasif karena pelibatan Kanwil dalam penyusunan Prolegda tergantung pada kebijakan	4		0,00		- Asistensi Prompempemda Maluku Utara dan Sulawesi Barat - Rapat Koordinasi Kanwil DKI

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
10	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	Laporan rapat koordinasi dan laporan kegiatan diskusi	3	3	100,00	data hasil penelitian/pengkajian terbatas	1		0,00		<p>Diskusi dengan Akademisi yang memiliki bidang keahlian terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dan dengan para stakeholders terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, yakni:</p> <p>Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara</p> <p>1. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Devita Kartika Putri, LL.M.</p> <p>2. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia:</p> <p>a. Dr. Mahruz Ali, S.H., M.H.</p> <p>b. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.</p> <p>3. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.</p> <p>4. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.</p> <p>5. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.</p>
11	melakukan koordinasi dengan unit eselon I yang memiliki kewenangan penyusunan RUU	Laporan rapat koordinasi			#DIV/0!	Kewenangan penentuan RUU yang akan disusun ada pada unit eselon I lain di Kementerian Hukum dan HAM	1		0,00		
12	Melakukan koordinasi dengan unit teknis pengampu substansi terkait kebijakan penormaan yang akan diatur dalam naskah akademik dan unit penelitian/pengkajian dan melaksanakan diskusi dengan mengikutsertakan akademisi, praktisi, stakeholder terkait	Laporan rapat koordinasi	3	3	100,00	Perubahan fokus penyusunan RUU pada unit teknis yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan substansi pengaturan	5		0,00		<p>Diskusi dengan Akademisi yang memiliki bidang keahlian terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dan dengan para stakeholders terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, yakni: Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara 1. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Devita Kartika Putri, LL.M. 2. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: a. Dr. Mahruz Ali, S.H., M.H. b. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. 3. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 4. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. 5. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. 6. Diskusi dengan para narapidana antarnegara di Lapas Kelas II A, Kerobokan, Bali. 7. Diskusi dengan The United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta Office. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha 1. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Udayana: a. Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa S.H., M.Hum. b. Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H. 2. Narasumber Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Dr. Arif Wisnu Wardana, S.H., M.Hum.</p>
13	Melakukan pemetaan terhadap RUU Prakarsa Pemerintah yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan Memperkirakan jumlah RUU DKT	Daftar pemetaan RUU Prakarsa Pemerintah yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan jumlah RUU DKT	1	1	100,00	Penyelarasan NA hanya dapat dilakukan jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa	5		0,00		Pemetaan dilakukan pada saat awal menentukan capaian target di awal tahun

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
14	Melakukan koordinasi dengan pemrakarsa	Jumlah koordinasi	1	6	600,00	Pemrakarsa lama dalam menetapkan kebijakan yang akan dituangkan dalam NA dan kurang memiliki komitmen dalam menindaklanjuti masukan	5		0,00		Koordinasi dilakukan baik melalui rapat secara formal maupun secara informal
15	Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemrakarsa	Jumlah koordinasi	1	6	600,00	Pemrakarsa tidak memiliki komitmen untuk memanfaatkan aplikasi Sirenkum	5		0,00		Sosialisasi dilakukan bersamaan pada saat diadakan rapat stakeholder
16	Melakukan pemantauan kepada staf Menkumham terkait dengan disposisi Menkumham	Jumlah koordinasi	1	6	600,00	Surat permohonan penyesuaian dan harmonisasi disampaikan dalam satu surat secara manual sehingga disposisi Menkumham hanya di tujukan kepada DitjenPP	5		0,00		Koordinasi dilakukan baik secara informal
17	Melakukan koordinasi/pendampingan dengan pemrakarsa sesuai dengan kebijakan pemerintah	Jumlah koordinasi	1	0	0,00	Perubahan kebijakan pemerintah	13		0,00		-
18	Sosialisasi Perpres Nomor 33 Tahun 2012	Laporan dan dokumentasi	5	33	660,00	Belum semua Anggota JDIHN memahami Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	10		0,00		Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan materi Kebijakan JDIHN dan Teknis Pengelolaan JDIH
19	Meningkatkan koordinasi antara BPHN dengan instansi terkait	UANG Rapat Tim Pembina JDIHN	5	1	20,00	Adanya beberapa instansi Anggota JDIHN yang terbentuk karena kebutuhan kebijakan	2		0,00		- Telah dibentuk Tim Pembina JDIHN Tahun 2023 dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor PHN.27-HN.03.05 Tahun 2023 - Telah dilaksanakan Rapat Tim Pembina JDIHN Tanggal 19 Juni 2023, dengan membahas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan JDIHN yang terkompilasi dari hasil Kegiatan Movev
20	Memperbaiki dan menyebarkan indikator penilaian	Juknis	1	1	100,00	Adanya kolusi dalam penilaian Pengelolaan Anggota JDIHN	10		0,00		- Melakukan update instrumen penilaian kinerja Anggota JDIHN Tahun 2023 - Membentuk Tim Penilai Kinerja Anggota JDIHN dengan SK Nomor PHN.01-HN.03.08 Tahun 2023 - Saat ini sedang dilakukan penilaian kinerja Anggota JDIHN Tahun 2022 sesuai dengan instrumen yang ditetapkan - Dalam kegiatan Asistensi Pengelolaan JDIHN yang dilaksanakan Kanwil Kemenkumham untuk materi kebijakan salah poin yang dijelaskan adalah instrumen penilaian kinerja anggota JDIHN
21	Meningkatkan kualitas sumber bahan pustaka dan sumber daya pendukung lainnya	Hasil IKM per semester	2	0	0,00	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum	5		0,00		Untuk Indeks Kepuasan masyarakat pada semester I belum dilaksanakan karena terkendala Aplikasi sehingga belum ada nilai indeks yang menjadi kepuasan pemustaka. Menunggu informasi lebih lanjut dari BSK Kemenkumham untuk pelaksanaan survei
22	Menerbitkan penarikan atas publikasi BPHN yang bermasalah	Surat Edaran	1		0,00	Quality Control atas substansi publikasi BPHN belum maksimal	3		0,00		Publikasi yang sempat bermasalah adalah terjemahan KUHP, namun mengingat saat ini sudah tidak relevan karena KUHP baru sudah disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka surat edaran tersebut tidak jadi kami proses lebih lanjut (urgensi untuk menerbitkan SE sudah tidak relevan)

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
23	Melakukan evaluasi dan perbaikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan untuk memenuhi standar yang ditetapkan	Laporan dan dokumentasi	1	1	50,00	Kurangnya kapasitas sumber daya (baik kualitas ataupun kuantitas) yang dibutuhkan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum	10		0,00		- Melakukan Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan pada Kanwil Sulawesi Utara (27 s.d. 29 Maret 2023) - Melakukan Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan pada Kanwil Lampung (3 s.d. 5 Mei 2023) - Melakukan Studi Banding Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan pada Universitas Gajah Mada (8 s.d. 10 Juni 2023) - Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Anggota JDIH, pengelolaan perpustakaan menjadi salah satu instrumen monev pada 33 Kantor Wilayah Laporan dan dokumentasi dalam proses penyusunan
24	Mengupayakan koordinasi dengan unit lain untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dan melakukan usulan anggaran untuk kebutuhan sarpras	Surat Permohonan	1	1	100,00	Kurangnya dukungan Sarana Prasarana dalam pengolahan dan pelayanan perpustakaan	13		0,00		- Menyusun Spesifikasi Sarana Prasarana yang dibutuhkan - Pernah mengirimkan surat permohonan PC ke Ditjen KI Bulan Januari
25	- Melakukan Sosialisasi Perpres 33/2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 serta - Promosi Program Percepatan Integrasi (PROPESI)	Laporan dan dokumentasi	2	1	50,00	Belum semua anggota JDIH memiliki website JDIH	13		0,00		- telah dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah melalui Kanwil Kemenkumham di 33 Provinsi (Februari - April 2023) - Untuk laporan dan dokumentasi PROPESI dalam proses penyusunan
26	Meningkatkan kompetensi pengelola JDIH Anggota JDIH melalui Workshop Pemahaman Standar Pengelolaan JDIH dan Validasi Dokumen Hukum JDIH	Laporan	1	0	0,00	Pengelola JDIH anggota JDIH belum memahami Standar Permenkumham 8/2019	8		0,00		- telah dilaksanakannya kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIH : Validasi Dokumen Hukum JDIH Tahun 2023 pada tanggal 7 - 9 Juni 2023 - kegiatan Workshop Pemahaman Standar Pengelolaan JDIH direncanakan di bulan agustus-september
27	Membuat aturan presiden terkait kebijakan yg mengatur/mengkoordinir program pembentukan Desa/Kel, meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan Anggaran pembentukan/pembinaan dan Monev DSH	Menetapkan Kebijakan terkait Koordinator Pelaksaaan Program yang di keluarkan oleh Presiden, Peningkatan Jumlah Pembentukan/Peresmian DSH	2	0	0,00	Banyaknya program pembentukan Desa/Kel yang dilaksanakan pada K/L sehingga pembentukan Desa/Kel Sadar Hukum ditingkat pemerintah pusat dan daerah sangat sulit hal ini karena masing-masing K/L menjalankan program Desa/Kel yang tidak dikordinir oleh salah satu K/L	5		0,00		Output 1 hubungannya dengan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden terkait kebijakan yang mengatur/mengkoordinir program pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum masih dalam proses dari awal tahun sesuai arah kebijakan pimpinan tidak sektoral dalam tiap Pusat namun digabung untuk keseluruhan Tugas Fungsi 4 (empat) Pusat yang ada di BPHN Output 2 hubungannya dengan Monitoring / Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum ..setelah dilakukan Monev secara adminstrasi pada semester 1 tahun 2022, tahun ini lakukan tindak lanjut dalam bentuk Pemantauan/Evaluasi faktual terhadap hasil Monev Administrasi dan telah tertuang dalam Target Kinerja Kantor Wilayah dengan timeline penyelesaian pada triwulan III Tahun 2023 / B09 Hasil Output 1 masih dalam proses dikarenakan ada perubahan kebijakan terhadap obyek yang ada dalam Perpres Hasil Output 2 masih dalam proses pengerjaan sesuai Target Kinerja Kantor Wilayah dimana akan selesai pada B09
28	Menyusun Peta Penyuluhan Hukum	Materi / Tema Penyuluhan Hukum	2	0	0,00	Belum disusunnya materi/tema penyuluhan hukum nasional yang akan digunakan sebagai materi/tema yang wajib dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum baik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi Pengguna JF Penyuluh Hukum	5	3	50,00	50,00	masih dalam proses penyusunan pedoman materi/tema penyuluhan hukum
29	menyusun sistem informasi database penyuluh hukum berbasis digital	Dokumen Pemetaan kompetensi	1	1	100,00	belum adanya pemetaan kompetensi JF Penyuluh Hukum	5	4	70,00	20,00	masih dalam proses update database penyuluh hukum
30	menyusun mekanisme sertifikasi Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum	Pedoman Sertifikasi	1	1	50,00	belum adanya Tim Uji Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum yang tersertifikasi	5	3	50,00	50,00	masih dalam proses penyusunan pedoman menyusun mekanisme sertifikasi Tim Uji Kompetensi Teknis

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
31	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	1	0	0,00	Kurangnya integritas dari Tim Verifikator daerah dalam pelaksanaan berkas permohonan bantuan hukum	5		0,00		Dilakukan nya Pembinaan kepada seluruh Tim Panwasda selaku Verifikator Kanwil di awal Tahun
32	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	1	0	0,00	Kurangnya pemahaman PBH terkait pentingnya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan lebih mengutamakan bantuan hukum litigasi	5		0,00		Melakukan koordinasi kepada Kanwil supaya dilakukan pembinaan kepada PBH terkait kegiatan Nonlitigasi
33	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	1	0	0,00	Pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima bantuan hukum	8		0,00		Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mengunjungi kantor OBH sedangkan secara tidak langsung dengan mengunjungi penerima bantuan hukum dengan melihat dokumen pendampingan yang ada di Sidbankum
34	Melakukan scanning data dan Updating Data pertriwulan	Laporan Jumlah data yang di scan pertriwulan	4	2	50,00	Kelalaian pegawai saat mengarsipkan atau menyimpan dokumen	1	4	400,00	50,00	Melakukan scanning Dokumen dan mengupload ke dalam aplikasi simpeg
35	Melakukan scanning data dan Updating Data pertriwulan	Laporan Jumlah data yang di scan pertriwulan	4	2	50,00	bencana alam seperti kebakaran dan banjir	12	1	8,33	70,00	Melakukan scanning Dokumen dan mengupload ke dalam aplikasi simpeg
36	Mengusulkan penambahan bandwidth internet khusus rekapitulasi di kepegawaian	Usulan Kapasitas bandwidth internet	1	1	100,00	Load server simpeg tinggi	12	6	50,00	50,00	Koordinasi dengan PSIK
37	Membuat pemberitahuan notifikasi setiap bulan pada media sosial whatsapp BPHN	Laporan	12	6	50,00	Pegawai terlambat menginput izin, DL, Cuti ke dalam SIMPEG	8	6	75,00	50,00	Melakukan pemberitahuan secara berkala
38	Meningkatkan responsif terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Monitoring peraturan / kebijakan	12	6	50,00	kurang responsif	8	4	50,00	50,00	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
39	Meningkatkan koordinasi terhadap perubahan peraturan kebijakan yang baru	Koordinasi dengan instansi terkait	12	6	50,00	kurang koordinasi antar instansi	5	4	80,00	50,00	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
40	Bimtek Analis Kebutuhan Diklat	Laporan bimtek analisis kebutuhan diklat	1	0	0,00	Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan	-1		0,00		Laporan bimtek tersedia di akhir tahun
41	Melaksanakan koordinasi yang intens dengan biro kepegawaian	Jumlah data yang diupdate	12	6	50,00	Biro kepegawaian lama dalam menerbitkan SK	8		0,00		Melakukan Koordinasi yang terus menerus
42	Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap dokumen evaluasi kinerja pegawai	Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai	12	6	50,00	Aplikasi Simpeg belum mengakomodir evaluasi kinerja sesuai Permenpan 6 Tahun 2022	4	8	200,00	70,00	Aplikasi Simpeg sampai dengan sekarang masih belum mengakomodir evaluasi kinerja sesuai permenpan 6 tahun 2022
43	Melakukan sosialisasi terkait penyetaraan jabatan	Laporan sosialisasi penyetaraan jabatan	12	6	50,00	belum optimalnya hasil penyetaraan jabatan	3		0,00		melakukan koordinasi dan masih menunggu proses penghapusan Koordinator Sub koordinator,
44	menempatkan pegawai baru sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi	Penerimaan pegawai	12	6	50,00	rekrutmen yang diadakan tidak sesuai dengan usulan jumlah kebutuhan	2		0,00		melakukan Pemantauan secara berkala/monitoring dan evaluasi secara berkala

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
45	Melakukan koordinasi dalam proses mutasi	Mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi	12	6	50,00	kurangnya memperhatikan kebutuhan organisasi saat mutasi	17		0,00		telah melakukan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai
46	Pemantauan secara berkala oleh pimpinan	SK terkait mutasi dan promosi	12	6	50,00	Proses pengusulan mutasi dan promosi tidak transparan	17		0,00		sudah dimulai dengan rapat tim kinerja mutasi
47	Melakukan internalisasi kepada seluruh pegawai	Sosialisasi Tata nilai PASTI, kode etik dan kode perilaku pegawai	1	0	0,00	Adanya kebutuhan pegawai agar proses pengurusan berkas kepegawaian dipercepat	95%		0,00		adanya perubahan peraturan kode etik kemenkumham menjadi BerAKHLAH, unit utama tidak dapat melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi diadakan oleh kementerian
48	Melakukan penelitian atau penelaahan atas usulan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran dari seluruh satuan kerja	Dokumen hasil penelitian atau penelaahan	4	0	0,00	Satuan kerja belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran	5		0,00		Masih dalam tahap proses penelitian/penelaahan data usulan Pagu Indikatif TA 2024, Dokumen hasil Penelitian/Penelaahan Pagu Indikatif di bulan Juli. Untuk tahapan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi selesai proses di bulan Oktober. Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 selesai proses di bulan Desember.
49	Sosialisasi tata naskah dinas	Koordinasi dengan instansi terkait	1	0	0,00	Kurangnya pemahaman mengenai tata naskah dinas	5		0,00		Untuk bulan September tahun 2022 kami sudah melaksanakan kegiatan Sosialisasi TND , Namun belum ada rencana terkait kegiatan tersebut untuk tahun ini , karena kami sedangkan fokus di sosialisasi aplikasi srikandi. mengingat aplikasi tersebut diawal bulan agustus Kementerian Hukum dan HAM sudah wajib menggunakan Aplikasi Srikandi.
50	Mengajukan Anggaran untuk Ruang Arsip Baru yang tahan air dan api	Usulan anggaran	1	0	0,00	- Terjadinya kehilangan arsip yang belum masuk daftar arsip - Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan arsip dalam ruang arsip - Kurangnya pengetahuan tentang jenis arsip	3		0,00		Kami belum mengajukan anggaran yang dimaksud, dikarenakan belum ada kepastian ruang arsip itu ruangnya dimana, untuk ruang arsip yang di lantai 3 hanya untuk sementara saja dan kami sampai saat ini menunggu arahan selanjut nya dari pimpinan terkait hal tersebut.
51	sosialisasi tata kelola kearsipan	pengelompokan arsip sesuai dengan klasifikasi pengarsipan	1	0	0,00	pemahaman kearsipan yang masih kurang	1		0,00		Dibulan Oktober kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi Tata Kelola Kearsipan, namun untuk tahun ini kami belum ada rencana mengadakan kegiatan tersebut, sekarang kami dibantu oleh JF Arsiparis dilingkungan BPHN untuk melakukan kegiatan pengelompokan arsip sesuai dengan klasifikasi pengarsipan. dan kegiatan pengelompokan arsip tersebut sudah berjalan dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan saat ini kegiatan tersebut masih berjalan sesuai dengan Norma, Kaidah dan aturan yang berlaku
52	sosialisasi sisumaker	penggunaan sisumaker secara aktif	12		0,00	pemahaman proses alur sisumaker yang masih kurang	4		0,00		Dipertengahan bulan Juli 2023 kami ingin melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi , Mengingat awal bulan agustus 2023 kementerian Hukum dan Ham sudah wajib Menggunakan aplikasi tersebut atas arahan Menkumham, namun terkait sosialisasi sisumaker tahun ini belum ada rencana perihal kegiatan sosialisasi sisumaker karena penggunaan sisumaker sampai saat ini tidak ada kendala dalam penggunaannya hanya beberapa kali kendala pada sistem aplikasi nya namun sudah dapat diatasi oleh TIM dari Pusdatin Setjen Kemenkumham
53	Menekankan kembali terkait tanggungjawab kontributor melalui bersurat secara resmi ke atasan masing-masing kontributor	Rapat Koordinasi Kontributor Humas	3	1	33,33	Kurang aktifnya kontributor humas di masing-masing pusat	4		0,00		Komunikasi informal sudah dilakukan namun untuk rakor resmi belum dilaksanakan
54	Melaporkan permasalahan kerjasama kepada Sekretaris BPHN	Koordinasi dengan pimpinan	4	2	50,00	Kurang taatnya pusat-pusat dalam mematuhi aturan terkait penyelenggaraan kerjasama	80 (nilai A)		#VALUE!		1. melaporkan hasil rapat kerja sama dengan Kementerian Desa, Mahkamah Agung mengenai draf kerja sama persiapa Paralegal Justice Award 2. koordinasi mengenai bahan dan video pelaksanaan donor meeting.

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
55	Perbaikan Dokumen LAKIP dan Melakukan reviu terhadap RENSTRA BPHN dan usul perubahannya ke tingkat kementerian	Konsep LAKIP dan hasil reviu internal RENSTRA BPHN	2	0	0,00	rekomendasi hasil reviu APIP belum seluruhnya ditindaklanjuti	35,00		0,00		LAKIP semester I BPHN masih dalam proses pengerjaan dan akan selesai maksimal tanggal 7 Juli 2023, sementara LAKIP Tahun 2023 akan selesai pada awal tahun 2024
56	Membuat dokumen rencana aksi dan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan Berita Acara hasil review TPI	Dokumen rencana aksi tindaklanjuti hasil review TPI	1	0	0,00	Persentase data dukung RB yang dinyatakan sesuai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah data dukung RB yang dipenuhi	0%		#DIV/0!		Dokumen rencana aksi tindaklanjuti hasil reviu TPI dalam proses
57	Menyusun update revisi RPD setiap Triwulan dengan pemangku kepentingan	Revisi RPD	4	2	50,00	Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan kalender kerja yang telah disusun	0		#DIV/0!		Telah dilaksanakan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan I pada tanggal 24 Januari 2023, dan Triwulan II TA 2023 tanggal 13 April 2023 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
58	Penyebarluasan dokumen RKAKL hasil revisi dan realisasi SAKTI secara update	Dokumen RKAKL revisi dan realisasi SAKTI	4	7	175,00	Pelaksana kegiatan belum menggunakan data RKAKL revisi terakhir saat penginputan di matrik semula menjadi	0		#DIV/0!		Hasil Revisi DIPA ke-2 s/d revisi ke-8 telah disebarluaskan ke Pusat dan Bagian sekretariat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran
59	Penginputan revisi dilakukan di awal dan koordinasi dengan Kanwil DJPb DKI Jakarta	Capture konsultasi by WA	4	7	175,00	Beban server aplikasi SAKTI di kemenkeu menjadi tinggi karena banyak diakses oleh seluruh satker di K/L	0		0,00		Melakukan konsultasi melalui CSO Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat PA DJPb Pusat Kemenkeu / Hai Kemenkeu
60	Melakukan sosialisasi terkait peraturan tata cara pembayaran yang berlaku.	Laporan dan dokumentasi kegiatan	12	3	25,00	Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan terkait tata cara pembayaran.	0		0,00		Telah dilakukan rapat internal terkait tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban dengan Pusat dan Bagian, serta di edarkan hasil rapat berupa Nota Dinas dari Sekteraris Badan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2023 di lingkungan BPHN
61	Melakukan reward and Punishment untuk pelaksana kegiatan.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan.	12	8	66,67	Kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan dalam ketepatan waktu mempertanggungjawabkan dokumen keuangan.	0		0,00		Melakukan revolving pertanggungjawaban yang sudah lengkap sebanyak 8 kali berupa GUP dan GTUP
62	Berkoordinasi dengan KPPN V via hai CSO dan konsultasi tatap muka terkait masalah yang dihadapi.	Hasil capture hai CSO dan jawaban dari Pembina teknis Perbendaharaan Negara.	12	9	75,00	Aplikasi down dan error dari server kemenkeu.	5		0,00		Melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPPN Jakarta V, DJPb dan Dit. SITP baik melalui HAI CSO maupun konsultasi langsung terkait masalah penggunaan aplikasi SAKTI.
63	Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan	Nota Dinas	1	7	700,00	Data dukung penyusunan laporan keuangan tidak diserahkan tepat waktu	5		0,00		1. Permintaan data dukung rekonsiliasi semester II TA 2022 kepada satker BPHN pada tanggal 17 Januari 2022 2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan BPHN Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan BPHN pada tanggal 27 Maret 2023; 3. Koordinasi dengan kanwil Jawa Barat melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Nilai IKPA DIPA BPHN pada tanggal 02 Maret 2023; 4. Koordinasi dengan kanwil NTB melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan DIPA BPHN pada tanggal 09 Maret 2023; 5. Koordinasi dengan kanwil Jawa Timur melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Nilai IKPA DIPA BPHN pada tanggal 16 Maret 2023; 6. Rapat Monev Realiasi Anggaran TW II dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monev TW I TA 2023 pada tanggal 22 Juni 2023; 7. Koordinasi dengan Kanwil NTT terkait permasalahan pada aplikasi SAKTI pada tanggal 03-10 Maret 2023.
64	Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan	Laporan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan	1	1	100,00	Pergantian aplikasi penyusunan laporan keuangan	5		0,00		Telah dilakukan koordinasi dengan Dit.SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada 06 Maret 2023

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
65	Melakukan Follow Up ke Biro BMN	Kordinasi dengan pihak terkait	2	1	50,00	update data SIMAN yang lama dari aplikasi SAKTI	5		0,00		Sudah terdapat perbaikan pada aplikasi SIMAN terkait proses penyusunan wasdal dan sudah melakukan koordinasi dengan KPKNL Jakarta IV (kementerian Keuangan) terkait sinkronisasi data master aset pada aplikasi SIMAN yang telah di sinkronisasi dari aplikasi SAKTI
66	Melakukan Follow Up ke Biro BMN	Kordinasi dengan pihak terkait	1	1	100,00	Penghapusan BMN seluruh Kementerian Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini dihandle oleh satu bagian yaitu bagian penghapusan BMN, baru diteruskan ke Kementerian Keuangan/KPKNL	5		0,00		Sudah berkoordinasi dengan biro pengelolaan BMN dan KPKNL Jakarta IV terkait usulan penghapusan BMN dan sedang dalam proses persetujuan oleh sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
67	Kementerian	Melaksanakan Bimtek dengan mengundang narasumber yang berkompeten	1	1	100,00	Masih sering terjadi error dan proses pembaharuan aplikasi yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan	3		0,00		FGD Persipan Rekonsiliasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh kementerian keuangan pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Aula KPPN Jakarta V
68	1. Laporan Service Level Aggrement (Perjanjian Service Layanan) memiliki nilai yang baik mengantisipasi "Down Akses" 2. Monitoring Akses Backup yang ada harus selalu kontinyu	Penyusunan Laporan tiap triwulan	2	2	100,00	Provider	4		0,00		Laporan rutin dari provider sudah tersedia terkait SLA Internet dan Managed Service Server di BPHN
69	Kebijakan pengelolaan SPBE BPHN	Pembentukan SK SPBE	1	1	100,00	Tidak terdapatnya Kebijakan SPBE Unit	#REF!		#REF!		Sudah dibentuk SK SPBE, Roadmap TI, dan rancangan ORTA terbaru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPBE
70	Koordinasi dengan Bagian kepegawaian	Dokumen SK	2	3	150,00	Keterlambatan penerimaan SK kenaikan pangkat/KGB/KP/ Fungsional dari Biro Kepegawaian membuat pembayaran gaji dan tunjangan terlambat	0		#DIV/0!		Telah diterima SK Kenaikan Pangkat bulan April 2023 dan KGB pegawai dari bulan Januari dan April 2023
71	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan Lembur	Nota Dinas	1	1	100,00	Pengajuan lembur pegawai kadang diusulkan lama setelah lembur selesai dilaksanakan	5		0,00		Sekretaris BPHN selaku KPA telah membuat Nota Dinas tentang tata cara pelaksanaan dan pembayaran lembur pegawai ASN tanggal 24 Januari 2023
72	Mengusulkan anggaran untuk generator set baru	Usulan anggaran	1	0	0,00	Penggantian generator set belum dapat terlaksana	0		#DIV/0!		Sudah diajukan untuk pembelian generator set baru di Tahun Anggaran 2024, akan tetapi belum ada pos anggaran untuk pembelian genset tersebut